

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG  
MEMFASILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Analisis Hukum Islam Kontemporer)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**PUTRI ANISA**

**NIM : 10300117036**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Anisa

NIM : 10300117036

Tempat/Tgl. Lahir : Basokeng, 25 Mei 2000

Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Alamat : Jl. Malino Perumahan Bumi Batara Mawang Permai  
Blok AA1 No.3

Judul : “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer  
Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana  
Narkotika (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaimana atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 21 Juni 2021

Penyusun

**Putri Anisa**  
10300117036

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MEMFASILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS HUKUM ISLAM KONTEMPORER)", yang disusun oleh PUTRI ANISA, NIM : 10300117036, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 8 Juli 2021 M, bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Makassar, 8 Juli 2021 M  
27 Zulkaidah 1442 H

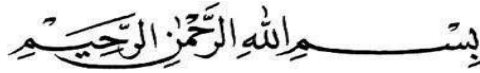
### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag. (.....)  
Sekretaris : Dr. Marilang, S.H., M.Hum. (.....)  
Munaqasy 1 : Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd. (.....)  
Munaqasy 2 : Dr. Rahma Amir, M.Ag. (.....)  
Pembimbing 1 : Dr. Hamzah, M.H.I. (.....)  
Pembimbing 2 : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Dr. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag.  
NIP. 197311222000121002

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah swt., berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Islam Kontemporer)” dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw., Rasul yang sangat berjasa yang membuka gerbang pengetahuan, nabi yang lembut tutur katanya, nabi yang paling sempurna ibadahnya dan yang menyelamatkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Begitu banyaknya hambatan, tantangan dan keterbatasan yang peneliti hadapi dalam penyusunan skripsi ini, hambatan yang peneliti hadapi mulai dari pengajuan judul skripsi, persiapan hingga proses penelitian dan analisis yang peneliti lakukan apalagi dimana pandemi Covid-19 ini. Namun hambatan dan permasalahan itu dapat teratasi berkat bantuan bimbingan dan kerjasama dari beberapa pihak dan itu semua tidak lepas dari dari sebuah perjuangan dan proses menuju kedewasaan yang akan menjadikan peneliti lebih kuat dan bijak untuk melewati berbagai hal kedepannya.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengungkapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku pimpinan tertinggi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajarannya.

2. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Dr. Achmad Musyahid, M.Ag dan Dr. Abdi Wijaya, S.S., M.Ag., masing-masing selaku Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan yang selalu memberikan waktunya, memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Hamzah, M.H.I. dan Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dan telah memberikan banyak petunjuk kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan dengan baik. Ucapan terimakasih juga kepada Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd. dan Dr. Rahma Amir, M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan ibu staf akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian mata kuliah dan penyusunan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu peneliti dalam menjalani studi.
6. Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H. selaku Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah banyak membantu peneliti dan memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang peradilan Militer dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua yang sangat tercinta Ayahanda dan Ibunda saya Muh. Yusuf dan Nurlina yang selalu mendoakan anaknya, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tidak pernah putus dan tidak akan bisa dibalas dengan apapun. Saya Anakmu hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga karena telah merawat, mendidik, dan menafkahi serta memberikan kasih sayang yang tiada tara.
8. Kepada saudari saya kakak Surniati, S.Pd. dan Abang saya Pratu Jeklin serta sanak keluarga dan Sahabat saya Sri Hidayanti, Bella Safitri dan Ahmad Fiqri dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan semangat serta doa sehingga peneliti dapat melewati berbagai hambatan.
9. Teman-teman kelas Perbandingan Mazhab dan Hukum terkhusus kelas B yang telah bersamai selama kuliah.
10. Terima kasih kepada teman dekat saya, Kiki, Faika, Iman, Fatma, Aqila terima kasih selalu ada.
11. Terima kasih kepada kak Mulham dan kak Rian yang menjadi inspirasi dan pencerahan dikala penulis bingung dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk mengajari saya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan ke-65 terkhusus kepada posko Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan doa dan dukungannya.
13. Teman-teman UKM Taekwondo UIN Alauddin Makassar, serta rekan-

rekan dari komunitas Guru Untuk Bangsaku yang telah, memberikan masukan dan dorongan serta semangat dalam penulisan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada Om Sertu Abbas, Serma Zainuddin, Praka Aziz dan abang Pratu Haeril serta teman seperjuangan SMA (FASTCO) yang selalu menyemangati saya dan selalu ada dalam penulisan skripsi ini terima kasih selalu membimbing dan memberikan banyak pelajaran.

15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dibutuhkan karena penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak serta kekurangan dan kekeliruan baik dari segi isi maupun segi sistematikanya yang di akibatkan karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.



Bulukumba, 1 Mei 2021

Penyusun

Putri Anisa  
10300117036

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	12
A. Tentara Nasional Indonesia .....	12
1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia .....	12
2. Sejarah Tentara Nasional Indonesia .....	13
3. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia .....	18
B. Narkotika Dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam Kontemporer .....	19
1. Pengertian Narkotika .....	19
2. Jenis-jenis Narkotika .....	21
3. Dasar-Dasar Hukum Narkotika .....	27
a. Hukum Pidana .....	27
b. Hukum Islam Kontemporer .....	32
4. Dampak Narkotika Dalam Kehidupan .....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....	37
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	37



B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data .....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	38
E. Instrumen Penelitian .....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MEMFASILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM KONTEMPORER .....</b>	<b>41</b>
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang   Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	41
B. Faktor Yang Menyebabkan Anggota Militer Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....	46
C. Penegakan Hukum Menurut Imam Mazhab Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Implikasi Penelitian.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>93</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### *A. Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut ini :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di

			atas
ى	<i>kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. *Ta' Marbūah*

Transliterasi untuk *tā' marbūah* ada dua, yaitu: *tā' marbūah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأُفْلَ : *raudalal-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*  
نَجِّنَا : *najjaina*

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-biladu*

#### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

- a. Hamzah diawal  
أَمْرُتُ : *umirtu*
- b. Hamzah ditengah  
تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
- c. Hamzah diakhir  
سَيِّءٌ : *syai'un*

#### 8. *Penulisan Kata Arab Yang Lazim digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkakan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan cara : bisa terpisah per kata bisa pula dirangkakan.

Contoh :

*Fil zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

#### 9. ***Lafz al-Jalalah*** (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dinullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tā' marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatullahi*

#### 10. ***Huruf Kapital***

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

*Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

s.w.t.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Maschi
SM	= Sebelum Maschi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
Q.S.	= Quran Surah
HR	= Hadis Riwayat





## ABSTRAK

Nama : Putri Anisa  
Nim : 10300117036  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Islam Kontemporer)

---

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana serta bagaimana hukum islam mengatur tentang sanksi atau hukum yang akan diberikan kepada penyalahguna narkotika walaupun pada zaman Rasulullah belum ada kasus yang seperti ini. Adapun pokok masalah yang akan dijabarkan dari sub masalah yaitu : (1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana narkotika ? (2) faktor apa saja yang menyebabkan anggota militer memfasilitasi pelaku tindak pidana narkotika ? (3) bagaimana penegakan hukum menurut imam mazhab terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif atau metode (*field research*) yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara kualitatif dimana memfokuskan pada metode penelitian lapangan serta menghubungkannya dengan hukum islam kontemporer. Penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer dengan mengelola data primer yang bersumber dari wawancara Hakim di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Dari penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa : (1) Dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana narkotika tetap diatur dalam UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan kasus nomor 064-K/PM.II-09/AU/III/2017 dengan dijatuhi hukum pokok dan pidana tambahan berupa penjara 1 tahun dan dipecat dari dinas militer. (2) faktor yang menyebabkan anggota militer memfasilitasi pelaku tindak pidana yaitu dari faktor internal dan eksternal seperti : faktor keluarga, psikologis dan pribadi. Dalam faktor pribadi yang sering terjadi yaitu hanya ikut-ikutan saja. (3) penegakan hukum menurut imam mazhab terhadap tindak pidana narkotika yaitu dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikarenakan dalam hal ini pada zaman Rasulullah belum ada yang dinamakan narkoba sehingga dikiyaskan menjadi *khamar*. Sanksi yang diberikan yaitu berupa hukuman *had* dan *ta'zir* sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun Implikasi yaitu sebaiknya dilakukan pengkajian terhadap Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam persoalan hukuman atau sanksi diberikan hendaknya lebih dipertegas lagi agar kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Bukan hanya efek jera tetapi juga dapat memberikan rasa takut dan menjadi pelajaran untuk yang lainnya, hal ini dikarenakan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara nomor 064-K/PM.II-09/AU/III/2017 hanya memberikan pidana pokok berupa satu tahun penjara.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang***

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang memegang teguh nilai dan prinsip hukum sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), serta tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga Negara bersama dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Perbuatan serta tindakan ataupun bentuk yang dilakukan oleh setiap penduduk atau masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lain yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan masyarakat, pada hakekatnya merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, apabila tindakan atau perbuatan tersebut dibiarkan terus-menerus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Moh. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2004), h. 73.

Tujuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual, agar terciptanya rasa aman dan damai dalam masyarakat untuk membangun suatu Negara dan terwujudnya pembangunan Nasional disegala bidang. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu muncul berbagai macam gejala-gejala yang menyebabkan penyalahgunaan obat untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini penyalahgunaan obat sering terjadi di dalam kalangan masyarakat termasuk dalam kalangan TNI.<sup>2</sup>

Militer atau biasa disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ialah suatu sistem keamanan yang tidak dapat terlepas pada bagian integral Negara. Hukum TNI (Tentara Nasional Indonesia), merupakan pertahanan Negara yang memiliki ketentuan dan sub sistem tertentu. Sebagai subsistem pertahanan keamanan Negara maka tugas serta hukum Militer harus dilakukan dengan baik dan benar demi menjamin terselenggaranya keamanan Negara.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan tugas, maka Tentara Nasional Indonesia memiliki kode etik yang bertujuan sebagai suatu tindak ke profesionalan atau ketaatan seorang prajurit serta melindungi suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kode etik Tentara Nasional Indonesia yaitu :

1. Warga Negara kesatuan
2. Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila

---

<sup>2</sup>Hm Ra'Uf, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas* (Jakarta: Dharma Bhakti, 2002), h. 55.

<sup>3</sup>Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, 1996), h. 2.

3. Pembela ideologi Negara serta bertanggung jawab dan tidak mengenal kata menyerah
4. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan membela kebenaran
5. Bayangkari Negara
6. Menjunjung tinggi sikap dan kehormatan seorang prajurit, disiplin dan taat kepada pimpinan
7. Sedia berbakti kepada Negara dan bangsa dan mengutamakan keberanian dalam bertugas
8. Setia serta menepati janji sumpah prajurit.<sup>4</sup>

Pembentukan kode etik tentunya terdapat sanksi atau hukuman yang diterima jika melanggar. Sanksi yang diberikan tergantung dengan berat atau kecilnya masalah yang ditimbulkan. Seperti hukuman dapat berupa teguran dan penahanan. Apabila masalah yang di timbulkan sangatlah fatal maka sanksi dapat berupa pencabutan jabatan dan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia.

Jauh sebelum Tentara Nasional Indonesia di kenal, Islam sudah mengenal lebih dulu kemiliteran. Militer pada zaman Rasulullah merupakan suatu kemuliaan kaum muslimin yang telah di tentukan Allah SWT. sebab Militer pada zaman Islam adalah bagian jihad atau mempertahankan dakwah. Dalam Militer Islam terdapat syarat atau ketentuan apabila hendak bergabung dengan Militer. Syarat yang paling penting adalah beriman, baliq, mendapat restu dari orang tua, laki-laki dan memiliki niat.

---

<sup>4</sup>Nandang Hermawan, “Kode Etik-TNI Angkatan Darat”, *Situs Resmi tniad.mil.id*. <http://tni.ad.mil.id/kode-etik/> (19 Juli 2012 ).

Militer pada zaman Rasulullah dengan zaman yang sekarang tentu sangatlah berbeda. Dilihat dari segi sanksi hukum yang diterima dan tugas yang dilakukannya. Di Indonesia apabila seorang anggota melakukan pelanggaran maka dilihat dari pelanggaran yang dilakukan, apakah pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana kejahatan umum yang tidak memiliki hubungan dengan status kedinasan atau justru dengan sebaliknya.

Andi Wijayanto yang merupakan pengamat Militer UI mengungkapkan bahwa, apabila seorang anggota melakukan tindak pidana kejahatan umum serta tidak memiliki kaitan dengan kedinasan maka POM yang lebih dulu bertugas menginterpretasi berhak mengajukan ke Peradilan umum. Tetapi jika memiliki hubungan dengan kedinasan seperti tempat kejadian menggunakan fasilitas Militer maka tetap di adili pada Peradilan Militer.<sup>5</sup>

Pada masa kontemporer atau masa kedisinian timbul berbagai macam kasus dan berbeda-beda. Seperti Narkotika, perselingkuhan, penganiayaan dan lain sebagainya yang menjerat oknum TNI. Narkotika berasal dari kata “*Narke*” yaitu terbius dan tidak merasakan apa-apa. Didalam ilmu kedokteran Narkoba dapat digunakan sebagai obat untuk pasien dengan dosis yang tepat.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan serta peredaran Narkotika kini telah berada pada tahap yang sangat memprihatinkan, hal ini dibuktikan dengan begitu mudahnya mendapatkan Narkoba. Obat terlarang ini dapat merambat keseluruh kalangan masyarakat yang

---

<sup>5</sup>Detik News, “TNI juga Bisa Diadili di Peradilan Umum”, *new.detik.com*, 31 Mei 2012. <http://newsdetik.com/berita/d-1929102/tni-juga-bisa-diadili-di-peradilan-umum> ( 21 Januari 2021).

<sup>6</sup>Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia, 2005), h. 15.

dapat mengancam dan merusak generasi penerus bangsa dan merupakan masalah yang sangat besar dihadapi bangsa Indonesia.

Bukan hanya pada kalangan masyarakat tapi para aparat Negara seperti Tentara Nasional Indonesia juga terjatuh pada kasus Narkoba.<sup>7</sup> Seperti yang tertera dalam perkara Pengadilan Militer Bandung No. 064-k/PM.II-09/AU/III/2-17. Seorang TNI yang merupakan Angkatan Udara yang berinisial JTJ berpangkat SERMA. Tututan Oditur Militer kepada JTJ terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1. Bahwa pada awalnya JTJ selaku terdakwa mendapatkan Narkotika jenis golongan 1 dari temannya yang berinisial AB yang pada awalnya AB hanya memberi cuma-cuma kepada JTJ untuk menghisap atau menggunakan Narkotika jenis golongan 1.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik membahas lebih dalam mengenai putusan hakim ditinjau dari perspektif hukum Islam kontemporer. Dalam hal ini peneliti mengajukan judul skripsi yaitu :

**“Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”.**

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih fokus pada anggota Militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika dengan menggunakan analisis hukum pidana dan hukum Islam kontemporer.

---

<sup>7</sup>Antara News, “Seorang Oknum TNI Jadi Bandar Narkoba Ditangkap Polisi di Bali”, *m.antaranews.com*, 17 juli 2020. <https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s> (21 Januari 2021).

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 111, ayat 1.

## 2. Deskripsi Fokus

Untuk memberi pemahaman yang lebih komperensif terhadap penelitian ini maka perlu kiranya ditegaskan definisi operasional terhadap penelitian ini.

Hakim berasal dari bahasa arab yaitu *حكيم-يحكم-حكم* dan sepadan dengan kata “*qadhi*” yang berarti memutus. Adapun menurut istilah hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkan.<sup>9</sup>

Militer dalam bahasa yunani yaitu “*miles*” yang berarti seorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.<sup>10</sup>

Hukum pidana adalah suatu hukum atau peraturan yang membahas tentang suatu larangan ataupun keharusan terhadap si pelanggar dengan acaman hukuman siksa badan.<sup>11</sup>

Hukum Islam kontemporer ialah suatu hukum yang bersifat kekinian atau kedinian yang merupakan salah satu bagian dari agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum memiliki beberapa istilah kata yang dapat membingungkan serta kadang kala membingungkan, istilah tersebut adalah (1) *hukum*, (2) *hukm dan akham*, (3) *Syariat atau syariah* serta (4) *fiqh atau fikih* dan beberapa macam istilah lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Ihyak, “Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peradilan Agama Indonesia” *Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas’ud Al-kasani*, vol. 1 (Ejournal Inklusif, 2016), h. 7.

<sup>10</sup>S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Babinkum TNI, 2012), h. 13.

<sup>11</sup>Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi dan Dr. Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 9.

<sup>12</sup>Prof. H. Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 42.



Narkotika atau biasa disebut sebagai *drug* ialah suatu jenis zat. Zat Narkotika merupakan suatu zat yang dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada mereka yang menggunakan. Pengaruh yang dapat di timbulkan berbagai macam seperti hilangnya rasa nyeri, pembiusan, berhalusinasi dan timbulnya khayalan atau berangan-angan.<sup>13</sup>

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Militer	Seorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara
Pelaku Tindak Pidana Narkotika	Seseorang yang melakukan suatu tindakan yang dilarang dalam waktu dan keadaan tertentu dan memiliki ancaman pidana.
Hukum Islam Koontemporer	Hukum yang bersifat kekinian atau kedinian yang merupakan salah satu bagian dari agama Islam

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka akan menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Islam Kontemporer). Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anggota Militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika ?
2. Faktor apa yang menyebabkan anggota Militer memfasilitasi pelaku tindak pidana ?
3. Bagaimana penegakan hukum menurut Imam Mazhab terhadap pelaku tindak pidana Narkotika ?

---

<sup>13</sup>Dr. Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987), h. 3.



#### ***D. Kajian Pustaka***

Untuk mendapatkan informasi yang real dalam penelitian ini terhadap karya-karya yang ada, dalam hal ini penulis akan mengilustrasikan tentang penelitian-penelitian yang telah ada serta berkaitan terhadap masalah yang sedang diteliti yaitu :

1. Buku karya dr. Subagyo Partodiharjo, yang berjudul “Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya”. Dalam buku ini sebagian besar membahas tentang Narkotika, ancaman hukuman serta dibagian lampiran terdapat teks UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang Narkotika dan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.
2. Jurnal oleh Ahmad Darwis, Gabena Indrayani dan Damunthe Sulaiman Riadi, yang berjudul “Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya” dalam jurnal ini membahas secara rinci tentang Narkotika, mulai dari definisi hingga jenis-jenisnya dan cara mengantisipasinya sedangkan skripsi ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap anggota Militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika.
3. Jurnal oleh Hamzah Hasan yang berjudul Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba. Dalam jurnal ini membahas tentang hukum pidana Islam yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Narkotika. Walaupun dalam jurnal ini belum membahas secara lengkap tetapi dari segi hukum Islam secara lengkap telah dijelaskan. Sehingga peneliti lebih mudah dalam menuliskan karya ilmiah.

4. Jurnal oleh Rahman Syamsuddin yang berjudul Sanksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedagang Minuman Beralkohol, jurnal ini secara garis membahas tentang minuman keras atau minuman beralkohol yang biasa disebut sebagai *khamar*. Selanjutnya dibahas juga mengenai dampak yang di timbulkan dari minuman keras sehingga dapat dikatakan bahwa Narkoba dan Minuman keras memiliki dampak yang sangat membahayakan sehingga Narkoba dikiyaskan sebagai *khamar* yang sifatnya haram.
5. Jurnal oleh Hj. Rahmatiah yang berjudul Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar, dari beberapa buku dan Jurnal diatas maka salah satu jurnal dari Hj. Rahmatiah juga memberikan pemahaman tentang dampak miras di Makassar sehingga menjadikan penulis lebih mudah memahami dan memberikan materi tambahan dalam penulisan ini sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mempelajari analisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika, karena dalam hal menjatuhkan putusan hendaknya hakim harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara dan apakah telah sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009.

- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anggota Militer dapat terjerat pada kasus penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini dari yang memfasilitasi pelaku tindak pidana.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anggota Militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika ditinjau dari perspektif hukum Islam, dalam hal ini menurut para imam Mazhab. Walaupun dalam tindak pidana Narkotika hanya di atur dalam UU, tetapi dalam hal ini penerapan akan mengulas tentang tindak pidana Narkotika dalam hukum Islam kontemporer.
2. Kegunaan penelitian
- a. Kegunaan teoritis, yakni dalam penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Militer yang memfasilitasi tindak pidana Narkotika jika ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hukum Islam kontemporer.
  - b. Kegunaan praktis
    - 1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap anggota Militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika, dalam pandangan hukum pidana dan hukum Islam kontemporer.
    - 2. Agar masyarakat mengetahui peran dan dampak sosial yang ditimbulkan ketika menyalahgunakan Narkotika.
    - 3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan pondasi bagi peneliti berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### ***A. Tentara Nasional Indonesia***

##### **1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia**

Menurut sejarah, Tentara Nasional Indonesia berasal dari rakyat, dan merupakan suatu kesatuan atau pasukan rakyat bersenjata yang ikut serta berjuang mempertahankan Indonesia Merdeka.<sup>14</sup> Disisi lain Tentara Nasional Indonesia atau biasa di sebut sebagai Militer adalah suatu organisasi atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela dikarenakan setiap individu dapat memilih pekerjaan sesuai dengan bidang yang ada di dalamnya.<sup>15</sup>

Dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 anggota Militer adalah Angkatan perang yang diwajibkan berada dalam masa dinas secara sukarela dan terus menerus serta memiliki tenggang waktu dalam ikatan dinas.<sup>16</sup> Jati diri Tentara Nasional Indonesia dalam pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 yaitu :

1. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga Negara Indonesia.
2. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

---

<sup>14</sup>Todiruan Dydo, *Pergolakan Politik Tentara Sebelum dan Sesudah G 30 S/PKI* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1989), h. 1.

<sup>15</sup>Samuel P. Huntington dan Burhan Magenda, *Militer dan Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 2.

<sup>16</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1974 tentang Peradilan Militer”.

3. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan Negara diatas kepentingan daerah, suku, ras dan kepentingan agama.
4. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dilengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti kebijakan politik Negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.<sup>17</sup>

Tentara Nasional Indonesia adalah suatu organisasi yang sangat berperan penting karena merupakan alat pertahanan Negara. TNI merupakan bagian yang utama dalam komponen kekuatan pertahanan Negara, maka dalam menjaga dan meningkatkan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia maka tingkat profesionalisme dan kualitas moral prajurit harus berada pada kondisi yang di harapkan.

## 2. Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Jika kita tidak memahami perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaanya pada tahun 1945-1950 memang sukar untuk dapat memahami hubungan TNI dengan rakyat dan keseluruhan bangsa, sebab TNI semata-mata bukanlah organisasi kemiliteran seperti biasa yang disamakan oleh orang-orang dengan organisasi-organisasi Militer pada umumnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, pasal 2.

<sup>18</sup>Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-Langkah Perjuangan Kita* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 1.

Lahirnya Tentara Nasional Indonesia dikarenakan Belanda ingin menjajah kembali Indonesia dengan kekerasan senjata. Nama sebelum TNI adalah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR diganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia melahirkan Tentara Nasional yang merupakan suatu perkembangan untuk menyempurnakan dan mempersatukan dua kekuatan yang bersentaja. Tepat pada tanggal 3 Juni 1947 TRI sebagai tentara regular serta badan perjuangan rakyat, maka dengan resmi Presiden menggabungkan dua kekuatan bersenjata ini dengan sebutan Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>19</sup>

Proses terbentuknya TNI setelah kemerdekaan bangsa di proklamasikan dalam keadaan yang masih genting yang dimana pada saat itu tentara Jepang masih banyak di Indonesia serta telah diperkirakan dalam waktu dekat kedatangan tentara sekutu, dengan adanya hal seperti ini maka timbulah rasa kekhawatiran bahwa orang asing akan meniadakan kemerdekaan serta mengambil dan menumpas bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang telah begitu lama di nantikan membuat masyarakat Indonesia begitu antusias serta bertekad terutama pemuda-pemuda Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya hal yang seperti ini maka terbentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Proses perwujudan serta tindakan pimpinan tentara Jepang mempermudah BKR dalam membubarkan tentara PETA (Pembela Tanah Air). Jepang membentuk tentara PETA hanyalah untuk dapat menyusun kekuatan gerilya regional. PETA

---

<sup>19</sup>Pusat Pencerangan TNI, tni.mil.id

yaitu tentara yang dibentuk oleh Jepang dalam masa penjajahan yang beranggotakan dari bangsa Indonesia. Meskipun diantara perwira PETA tentu ada yang menjadi pengikut setia Jepang, namun bagian yang penting dan utama terdapat di antara “*syoodantyo*” (komandan-komandan peleton) telah bersemangat nasional serta mempersiapkan diri untuk menghadapi saat-saat kemerdekaan. Setelah peperangan selesai dan Jepang kalah, maka Indonesia mengambil tindakan dengan membubarkan tentara PETA, dalam hal ini dimungkinkan karena kekhawatiran bahwa tentara PETA jika dalam keadaan utuh dan bersenjata lengkap walaupun ringan, akan mengganggu kedudukan tentara Jepang yang ada di Indonesia oleh karena beberapa hari yang lalu, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaan bangsa Indonesia.<sup>20</sup>

Sebagian besar pemuda-pemuda bekas anggota PETA mendaftarkan diri untuk BKR dan bekas Perwira PETA kemudian diangkat menjadi pimpinan BKR. Bukan hanya tentara PETA yang ada di Indonesia pada saat penjajahan Jepang, tetapi dikenal juga tentara HEIHO (Tentara Yang Oleh Jepang). Tentara HEIHO adalah tentara yang direkrut oleh Jepang pada masa pendudukannya dan tentara ini merupakan orang Indonesia. Setelah mendengar proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia banyak di antara tentara HEIHO yang meninggalkan tentara Jepang dan ingin bergabung dengan BKR. Mereka meninggalkan tentara Jepang dikarenakan mereka tidak di anggap sebagai *heitasain* atau prajurit maka dari itu mereka diperlakukan layaknya binatang bukan sebagai manusia pada dasarnya.

---

<sup>20</sup>Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-Langkah Perjuangan Kita* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 2.

Badan Keamanan Rakyat (BKR) semata-mata tidak merekrut orang-orang Indonesia bekas tentara, tetapi kebanyakan merupakan pemuda-pemuda pelajar dan mahasiswa. Meskipun mereka tidak mempunyai bakat kemiliteran, tetapi mereka memiliki semangat kemerdekaan mengatasi segala kekhawatiran dan menjadikan mereka bertekad untuk berjuang demi kemerdekaan.

Sebagai Negara merdeka Pemerintah Republik Indonesia berinisiatif mengubah BKR menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan merupakan suatu tentara resmi. BKR dan TKR mempunyai semangat dan keadaan yang sama tetapi kelengkapan organisasi BKR lebih sempurna dibandingkan dengan TKR. Secara garis besar dalam peperangan TKR mereka tidak memiliki satupun peralatan atau persenjataan dalam melawan, dikarenakan organisasi ini berjuang bersama rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan terutama pada daerah-daerah, tetapi bagi mereka ini bukanlah merupakan penghalang karena organisasi ini memiliki semangat nasional yang satu serta kehendak dalam membela Negara. Perlawanan rakyat yang terjadi di Surabaya terhadap Inggris pada 10 November 1945 merupakan pertempuran sengit yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.<sup>21</sup>

Meskipun telah merdeka tetapi lambat laun Belanda akan kembali ke Indonesia, namun organisasi Republik Indonesia menjadi lebih rapi dan tertata. Kekuasaan Negara baru menjadi terasa yang terdapat pada pulau Jawa dan Sumatera kecuali di kota-kota yang besar yang berada di tepi pantai seperti Bandung. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) seringkali mengganti nama dari TKR berubah menjadi

---

<sup>21</sup>Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-Langkah Perjuangan Kita* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 3.



Tentara Republik Indonesia (TRI). Walaupun seringkali mengubah nama tetapi sifat dan kekhasan sebagai seorang tentara pejuang tetap melekat dalam dirinya.<sup>22</sup>

Seiring berjalannya waktu maka terbentuklah partai-partai politik, dalam partai politik ini mereka juga membentuk badan-badan kemiliteran yang sering disebut sebagai kelaskaran. Jika kita berbicara kelaskaran maka kita teringat dengan pasukan Hizbullah, Barisan Benteng, BPRI, Pesindo dan sebagainya. Jadi yang membedakan pasukan TRI dengan badan-badan kelaskaran yaitu sifat perjuangannya. Badan-badan kelaskaran merupakan aparat suatu partai politik, jika badan-badan ini turun maka itu dilakukan atas perintah dari pimpinan partai yang bersangkutan yang terdapat di daerah masing-masing, ini mengakibatkan bahwa tidak jarang timbul ketegangan-ketegangan antara badan-badan kelaskaran dengan TRI terutama di front. Badan-badan kelaskaran jarang sekali mau diatur dan dikendalikan dalam suatu organisasi pertahanan bersama maka harus dikatakan mereka memiliki tekad yang sangat besar dan keberanian melawan penjajah seperti halnya dengan pasukan TRI, tetapi yang menjadi masalah adalah persoalan dari segi organisasi komando. Nah ini lah yang mengakibatkan mengapa di daerah Jawa Jenderal Mayor A.H. Nasution mengatakan bahwa badan-badan kelaskaran diharuskan masuk dalam TRI untuk memperoleh suatu komando yang tegas. Pada perang kemerdekaan I dan berakhir dengan di persempitnya daerah Republik di Jawa dan Sumatera, maka Pemerintah Republik Indonesia berinisiatif untuk mengadakan reorganisasi dan rasionalisasi dalam kekuatan bersenjata; dalam hal ini menyatukan badan-badan kelaskaran kedalam TRI. Setelah menggabungkan badan-badan

---

<sup>22</sup>Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-Langkah Perjuangan Kita*, h. 4.

kelaskaran dengan TRI maka Tentara Republik Indonesia di ubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut sebagai TNI.<sup>23</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki 3 prinsip yaitu menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari gangguan dan ancaman. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) dijelaskan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 dalam Pasal 7 ayat (1).

Dalam operasi Militer ini merupakan tugas pokok yang harus dilakukan dalam perang serta dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dirinci sebanyak 14 butir tugas. Salah satu diantaranya adalah mengatasi pemberontakan, aksi terorisme serta gerakan separatis bersenjata. Bukan hanya mengatasi tetapi Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat mengamankan dan membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Demi menjaga integritas serta menjamin terlaksananya tugas Tentara Nasional Indonesia yang telah diatur dalam peraturan umum, maka diperlukan juga peraturan khusus yang bersifat lebih keras dan lebih berat dikarenakan TNI berhubungan langsung dengan tegak dan runtuhnya Negara. Dalam peraturan khusus diantaranya terdapat hukum pidana Militer dan hukum acara pidana Militer. Untuk membedakan hukum pidana umum dengan hukum pidana Militer dalam penerapannya hukum pidana Militer dipisahkan kedalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>23</sup>Sayidiman Suryohadiprojo, *Langkah-Langkah Perjuangan Kita*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 5.

<sup>24</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI”.

Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang merupakan hukum materil dan hukum acara pidana Militer. Sistematis yang digunakan dalam hukum Militer terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.

## ***B. Narkotika Dalam Hukum Pidana dan Hukum Islam Kontemporer***

### **1. Pengertian Narkotika**

Secara etimologi Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Sedangkan menurut istilah atau secara terminologi Narkoba adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik secara sintesis maupun non sintesis yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran serta dapat mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Dalam dunia aparat penegak hukum terdapat sebutan lain dan familiar terhadap Narkotika yaitu Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif). Pada praktisi kesehatan dan rehabilitasi mereka sering kali menggunakan istilah *napza*. Tetapi makna dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.<sup>25</sup>

Menurut UU RI no. 35 tahun 2009 pasal 1 tentang Narkotika disebutkan bahwa

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”*<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya*, (Medan : UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017), vol. 1, h. 38.

<sup>26</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Narkotika merupakan zat dapat mempengaruhi tubuh berupa rangsangan semangat, halusinasi dan pembiusan. Narkotika tidak hanya di gunakan dalam hal negatif tetapi Narkotika atau kadangkala di sebut sebagai *drug* dalam dunia kedokteran bertujuan sebagai pengobatan dikarenakan dapat menghilangkan rasa sakit dan sangat berguna dalam bidang pembedahan.<sup>27</sup>

Narkoba sering di anggap keliru oleh beberapa kalangan, banyak jenis Narkoba yang dapat menyembuhkan penyakit dan dapat mengakhiri penderitaan seseorang. Narkoba dalam dunia medis memiliki jasa yang sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Dalam dunia medis tindakan pembedahan (operasi) yang dilakukan oleh Dokter hendaklah didahului dengan pembiusan. Sedangkan, obat pembiusan ataupun penghilang rasa sakit ini tergolong kedalam Narkoba. Bukan hanya penghilang rasa sakit, tetapi orang yang mengalami stress dan gangguan jiwa juga diberi obat-obatan yang tergolong kedalam Narkotika.

Dengan pengertian tersebut, telah jelas bahwa Narkoba tidaklah selalu berdampak buruk, terdapat jenis Narkoba yang memiliki setuja manfaat dalam bidang kedokteran. Maka dari itu, sikap antinarkoba adalah keliru, yang benar adalah anti penyalahgunaan Narkoba. Karenanya yang diperangi bukanlah Narkoba, tetapi melainkan penyalahgunaannya.<sup>28</sup>

Kadangkala masyarakat salah kaprah terhadap penamaan dan memberikan stempel negatif kepada kata Narkoba, seolah-olah narkoba ini adalah barang yang

---

<sup>27</sup>Dr. Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), h. 3.

<sup>28</sup>dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), h. 10.

tak berguna. Dimana-mana banyak pengumuman, spanduk, dan brosur yang berbunyi “Perangi Narkoba”, “Haramkan Narkoba”, “Basmi Narkoba”, “Anti Narkoba” dan sebagainya. Banyak pemimpin dan pejabat yang menyerukan kepada rakyat agar memusuhi Narkoba, tetapi faktanya Narkoba sebagian besar memiliki setuja manfaat terutama dalam bidang kedokteran.

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Jenis Narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu golongan I, golongan II dan golongan III. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya. Dikarenakan daya adiktifnya sangat tinggi. Contohnya adalah Ganja, Heroin, Kokai, Morfin, Opium, dan lain-lain. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II contohnya adalah petidin dan turunannya, Benzetidin, Betametadol, dan lain-lain. Narkotika ini memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.<sup>29</sup>

Narkotika golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah Kodein dan turunannya.

Berdasarkan cara pembuatannya, Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu Narkotika alami, Narkotika semisintesis, dan Narkotika sintesis.

### a. Narkotika alami

---

<sup>29</sup>dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), h. 11.

Narkotika alami adalah Narkotika yang zat adiktifnya diambil dari alam (tumbuh-tumbuhan). Contohnya :

### 1. Ganja

Ganja adalah suatu tanaman perdu yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan daun menyerupai daun singkong. Ganja banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5,7,9.<sup>30</sup>

Ganja berasal dari tanaman *kanabis sativa* dan *kanabis indica*. Tanaman ini mengandung 3 zat utama yaitu *tetrahidrokanabinol*, *kanabinol* dan *kanabidiol*.<sup>31</sup>

Daun Ganja sering juga digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup.<sup>32</sup> Dampak buruk yang di timbulkan yaitu :

1. Denyut jantung lebih cepat
2. Mulut serta tenggorokan kering
3. Banyak bicara dan bergembira serta merasa lebih santai
4. Sulit mengingat suatu kejadian
5. Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi
6. Menjadi agresif bahkan kadang sampai pada tingkat kekerasan

---

<sup>30</sup>dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), h. 12.

<sup>31</sup>Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya*, (Medan: UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017), vol. 1, h. 39.

<sup>32</sup>dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, h. 12.

7. Mengakibatkan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek bila pemakaian dihentikan
8. Gangguan kebiasaan tidur
9. Gelisah dan sensitive
10. Berkeringat
11. Berfantasi
12. Selera makan bertambah<sup>33</sup>

## 2. Hasis

Hasis merupakan suatu tanaman yang serupa dengan Ganja. Tanaman ini tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Hasis ini berbentuk cair karena prosesnya adalah disuling. Daun Ganja Hasis, dan Mariyuana memiliki harganya yang sangat mahal. Gunanya, biasanya disalahgunakan oleh pepadat-pepadat “kelas-tinggi”.

## 3. Koka

Tanaman Koka hampir sama dengan pohon kopi, Karena buah Koka yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Koka diolah menjadi kokain. Dalam komunitas masyarakat Indian Kuno, biji Koka digunakan sebagai penambah kekuatan kepada orang yang berperang atau pemburu.<sup>34</sup>

## 4. Opium

Opium merupakan tanaman bunga dengan bentuk dan warna yang sangat indah. Opium berasal dari hasil olahan getah dari buah tanaman *papaver somniferum* atau Bunga Opium yang menghasilkan candu. Opium di Mesir dan daratan China

---

<sup>33</sup>Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya* (Medan: UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017), vol. 1, h. 41.

<sup>34</sup>dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), h. 13.



digunakan sebagai obat pada beberapa penyakit, memberi kekuatan dan menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka pada saat perang ataupun berburu.

Biasanya terjadi kekeliruan dalam kalangan perdagangan, kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah “emas”. Opium banyak tumbuh di “segitiga emas” antara Burma, Kamboja dan Thailand, atau di daratan China dan “segitiga emas” Asia Tengah, yaitu antara Afganistan, Iran dan Pakistan.

Dikatakan sebagai segitiga emas dikarenakan bahayanya yang besar, tetapi penamaan tersebut keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiat sepantasnya disebut “segitiga setan” atau “segitiga iblis”.<sup>35</sup> Dampak yang di timbulkan dari opium yaitu :

1. Menimbulkan rasa *rushing sensation* (rasa kesibukan)
2. Menimbulkan semangat
3. Merasa waktu berjalan lambat
4. Pusing, kehilangan keseimbangan/mabok
5. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang)
6. Timbul masalah kulit disekitar hidung dan mulut<sup>36</sup>

b. Narkotika semisintesis

Narkoba semisintesis merupakan Narkotika alami yang di olah dengan di ambil zat adiktifnya (intisarinya), Narkoba ini di buat dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* dan di proses secara alami. Intisari dari Narkotika ini memiliki khasiat

---

<sup>35</sup>dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), h. 14.

<sup>36</sup>Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya* (Medan: UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017), vol. 1, h. 40.



yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya adalah<sup>37</sup> :

1. Morfin adalah suatu zat aktif (Narkotika) yang diperoleh dari suatu candu yang melalui pengolahan secara kimia.<sup>38</sup> Morfin dipakai di dalam dunia medis untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada pembedahan (operasi).<sup>39</sup> Pada umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya adalah dengan cara menyuntikkan kedalam kulit bagian bawah, kedalam otot atau pembuluh darah (intravena). Dampak buruk yang dapat ditimbulkan jika menyalahgunakan Morfin yaitu :
  - a. Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi)
  - b. Menimbulkan *euphoria*
  - c. Berkeringat
  - d. Konfusi (kebingungan)
  - e. Gelisah dan perubahan suasana hati
  - f. Warna kulit muka berubah dan mulut kering
  - g. Dapat menyebabkan pingsan dan jantung berdebar-debar<sup>40</sup>
2. Kodein dalam dunia kedokteran digunakan sebagai obat penghilang batuk
3. Heroin adalah suatu zat yang berbentuk bubuk yang dihasilkan atas pengolahan Morfin secara kimiawi dengan melalui 4 tahapan dan dibagi

---

<sup>37</sup>dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, h. 14.

<sup>38</sup>Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkotika, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya* (Medan: UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017), vol. 1, h. 39.

<sup>39</sup>dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), h. 14.

<sup>40</sup>Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkotika, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya*, vol. 1, h. 40.

menjadi 2 yaitu Heroin murni dan tidak murni. Heroin murni berkadar 80-90% dan berbentuk bubuk putih sedangkan Heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat cepat menembus ke otak sehingga bereaksi lebih kuat daripada Morfin itu sendiri. Maka dari itu Heroin tidak digunakan dalam pengobatan dikarenakan daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum diketahui. Morfin digunakan dengan cara disuntik ataupun di hirup karena berbentuk seperti tepung terigu: halus, putih, dan agak kotor. Dampak yang ditimbulkan jika mengonsumsi Heroin adalah timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/*rushing sensastion* ( $\pm$  30-60 detik), diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh ketenangan hati (*euphoria*) dan kedamaian ataupun kepuasan serta ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.<sup>41</sup>

4. Kokain merupakan hasil olahan dari biji Koka. Kokain dibagi menjadi 2 bentuk yaitu: bentuk asam (*kokain hidroklorida*) dan kokain basa (*free base*). Kokain asam adalah suatu zat yang berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan mudah larut dibanding bentuk kokain basa bebas yang tidak berbau dan rasa yang pahit. Narkotika jenis ini digunakan dengan cara dihirup yaitu dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian diatas kaca atau benda yang memiliki permukaan yang datar, kemudian di hirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain

---

<sup>41</sup> Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya* (Medan: UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017), vol. 1, h. 39.

dengan di bakar dengan tembakau yang biasa di sebut *cocopuff*. Menghirup Kokain dapat mengakibatkan luka pada sekitar hidung bagian dalam.<sup>42</sup>

### c. Narkotika sintesis

Narkotika sintesis merupakan suatu Narkotika palsu yang terbuat dari bahan kimia. Narkotika jenis ini di gunakan untuk pengobatan dan pembiusan dalam dunia kedokteran bagi orang yang ketergantungan (substitusi), contohnya :

- a. Petidin : digunakan untuk obat bius lokal seperti operasi kecil, sunat, dsb.
- b. Naltrexone : digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.
- c. Methadon : digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, Narkotika sintesis juga digunakan oleh dokter kepada penyalahguna Narkoba agar dapat menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan *relaps* (sugesti) atau *sakaw*. Narkotika sintesis ini digunakan kepada penyalahguna Narkoba sebagai “pengganti sementara”. Apabila telah benar-benar dinyatakan bebas, maka asupan Narkoba sintesis ini akan dikurangi sedikit demi sedikit hingga akhirnya berhenti total.<sup>43</sup>

## 3. Dasar Hukum Narkotika

### a. Hukum Pidana

Dasar hukum Narkotika dalam hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hukum pidana terdapat 3 ketentuan utama yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban serta pemidanaan. Dalam ketentuan tersebut terdapat 4 jenis tindakan melawan hukum serta mempunyai

---

<sup>42</sup>Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya*, vol. 1, h. 40.

<sup>43</sup>dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), h. 15.

sanksi hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Ketentuannya yaitu sebagai berikut<sup>44</sup> :

1. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 111 dan 112 serta Pasal 129 huruf (a). perbuatan tersebut untuk Narkotika Golongan III;
2. Perbuatan yang berupa mengelola, mengimpor dan mengekspor Narkotika dan *precursor*. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 118 dan untuk Golongan III diatur dalam Pasal 129 huruf (b);
3. Perbuatan yang berupa jual beli, transaksi, menjadi perantara Narkotika dan prekursor Narkotika. Dalam Pasal 114 dan Pasal 116 tergolong ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 119 dan Pasal 121, sedangkan untuk Golongan III diatur dalam Pasal 129 huruf (c);
4. Perbuatan berupa mengirim, mengangkut atau membawa serta mentransit. Perbuatan ini di atur dalam Pasal 115 untuk Narkotika Golongan I, untuk Golongan II di atur dalam Pasal 125 sedangkan dalam Pasal 129 huruf (d) mengatur Narkotika Golongan III.

Selain perbuatan-perbuatan diatas, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga mengatur hukuman atau jenis sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai korban atau penyalahgunaan Narkotika Tindak Pidana yang diberikan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

---

<sup>44</sup>Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Naarkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 256.

2. Untuk Orang Tua/Wali yang belum cukup umur (Pasal 128) dan merupakan pecandu Narkotika dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Bagi orang yang mengetahui dan tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika (pasal 131) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
4. Bagi Korporasi (Pasal 130) apabila melakukan Tindak Pidana Narkotika maka dipidana dengan pidana 3 (tiga) kali pemberatan yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan status badan hukum dan pencabutan izin usaha.
5. Memberi, membujuk, menyuruh dan memaksa dengan kekerasan, membujuk anak (Pasal 133) ayat 1 merupakan Tindak Pidana Narkotika dengan ancaman pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat 5 (lima) tahun dan 20 (dua puluh) tahun paling lama serta pidana denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dalam ayat 2 Pasal 133 pidana penjara paling lama 15 (lima belas) dan paling sedikit 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
6. Percobaan dan permufakatan jahat dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika dan precursor di atur dalam Pasal 132 ayat 1 dan 2 dengan pidana

penjara sesuai dengan sebagaimana yang di atur dan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga).

7. Bagi pecandu dan tidak melaporkan diri diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ketentuan ini terdapat dalam Pasal 134 ayat 1. Sedangkan dalam ayat 2 yaitu dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
8. Tindak Pidana terhadap hasil tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika diatur dalam Pasal 137 huruf a dan b, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
9. Bagi pengurus industri Farmasi dan tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan ketentuan Pasal 135 sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
10. Bagi Nahkoda/Kapten Penerbang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 maka diancam dengan Pidana dalam Pasal 139 sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
11. Orang yang mempersulit dan menghalangi penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan perkara diancam dalam Pasal 138.
12. Bagi PPNS, Penyidik BNN, Penyidik POLRI yang tidak melaksanakan Ketentuan dalam hal Barang Bukti di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana di atur dalam Pasal 140.

13. Bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 Ayat (1), dan melakukan Tindak Pidana maka diancam dengan Pidana Penjara dan Pidana Denda sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal-Pasal tersebut.
14. Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam melakukan Tindak Pidana maka diancam dengan Pidana yang terdapat dalam Pasal 143 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal-Pasal tersebut.
15. Tindak pidana bagi Petugas Laboratorium dalam hal ini memasukan hasil pengujian maka diancam dengan pidana sebagaimana yang tertera dalam Pasal 142 dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.
16. Bagi setiap orang yang Melakukan Pengulangan dalam Tindak Pidana Narkotika diancam dengan pidana maksimumnya ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 144.
17. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Industri Farmasi, Ilmu Pengetahuan, dan Pedagang Farmasi diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.

Selain penjelasan diatas sesuai dengan Pasal yang berlaku, terdapat pula dalam Pasal 146 yang memberikan sanksi kepada warga Negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika di Indonesia, dalam hal ini seorang warga Negara asing harus menjalani hukuman dan dilakukan pengusiran serta mem*blacklist* agar tidak dapat kembali lagi ke Indonesia. Sedangkan dalam pasal 148 dijelaskan



apabila dalam putusan ini berupa putusan denda tidak dibayarkan maka pelaku akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti.<sup>45</sup>

## b. Hukum Islam Kontemporer

Narkotika atau obat-obat terlarang (Narkoba) dalam bahasa Arab yaitu *al-mukhaddirat* yang berarti membius, tidak sadar, mati rasa, atau memabukkan. Sedangkan menurut istilah Narkoba tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran maupun didalam Hadis tetapi hanya menjelaskan tentang *Khamar*, tetapi hal dapat ditentukan status hukumnya melalui metode *Qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan atau membandingkan suatu hukum yang dimana dilihat dari besarnya dampak yang di timbulkan dengan kebaikan yang diberikan. Dilihat dari segi dampak buruk yang diberikan, Narkoba memiliki dampak buruk yang lebih besar dibandingkan dengan *khamar*.<sup>46</sup>

Hukum Islam kontemporer adalah perspektif hukum Islam yang membahas masalah tentang suatu kekinian atau kedinian. Dalam hukum Islam Narkoba tergolong kedalam *khamar* karena benda ini dapat memabukkan dan menghilangkan akal pikiran yang disebabkan oleh 'Illat yang ditimbulkannya. 'Illat merupakan salah satu benda yang dapat memabukkan sesuai dengan Hadis Nabi :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

<sup>45</sup>Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, AIDIL, Jurnal Hukum Vol 7 No.1, hlm 150-154.

<sup>46</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h.224.



Artinya :

“ telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdillah, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata: telah menceritakan kepada kami zuhri, dari Abu Salamah, Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah saw. bersabda: Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram”.<sup>47</sup>

Disamping diharamkannya Narkotika atau obat-obat terlarang (Narkoba), bagi orang yang pernah merasakan kenikmatan dapat menimbulkan ketagihan, serta dapat berakibat buruk dan dapat merusak akal dan fisik. Ibn Taimiyah menerangkan bahwa Ganja lebih di yakini lebih jahat dari *khamar*, maka dari itu hukum Islam melarang menggunakan maupun mengonsumsi benda-benda yang seperti ini baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.<sup>48</sup>

Selain itu, Sayyid Al-Sabiq berpendapat, “ Sesungguhnya Ganja itu haram. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan *khamar*. Orang yang menyalahgunakannya akan diberikan sanksi *had*, sebagaimana dengan sanksi peminum *khamar*. Ganja bukan hanya merusak akal tetapi dapat menyebabkan seseorang berpaling dan tidak mengingat Allah dan melaksanakan Sholat. Jika ditinjau dari segi sifatnya Ganja memiliki sejuta dampak negatif kepada tubuh maka dari itu Ganja secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah swt dan Rasulnya dan termasuk kedalam kategori haram.”<sup>49</sup>

Hikmah diharamkannya *khamar* dikarenakan zat ini adalah induk kejahatan serta dapat membuat seseorang melakukan tindak kejahatan. Ulama telah sepakat

---

<sup>47</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja‘fī, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūru Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallama wa Sinnahu wa Ayyāmuhu*, Juz I (Cet. I; Dār Ṭūki Najātī, 1422), h. 58.

<sup>48</sup>Hamzah Hasan, “Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan”, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, vol.1 no. 1 (13 Juni 2012).

<sup>49</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 173.

menjadikan Narkoba hukumnya haram baik itu kepada pemakai, bandar, pengedar sekalipun petani yang menanam tanaman yang dapat di jadikan Narkoba.

Sanksi penyalahgunaan Narkoba dibedakan sesuai dengan tindakan yang dilakukan seperti pemakai dan pengguna. Tetapi jika melakukan tindakan sekaligus memakai dan mengedar maka tentu harus diberikan sanksi yang sangat berat ketimbang hanya sekedar memakai saja. Seperti halnya seorang pemakai dan pengedar tidak hanya di hukum dengan hukuman cambuk tetapi sesuai dengan tingkat keseriusannya maka harus disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan. Dalam hukum Pidana Islam di bagi menjadi dua jenis sanksi yaitu sanksi hukum *Hudud* dan hukum *Takzir*.<sup>50</sup>

Sanksi hukum *hudud* merupakan sanksi yang diberikan seperti dengan peminum *khamar*. Dalam hal ini Azat Husnain berpendapat “Sanksi *hudud* dijatuhkan kepada peminum *khamar* dan kepada orang yang menyalahgunakan Narkotika”. Sedangkan sanksi hukum *Takzir* dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, sanksi hukum *takzir* diberikan kepada pelaku penyalahgunaan Narkoba dengan tindakan sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan hukum yang berat terhadap pengedar dan penjual serta yang membantu menyelundupkan bahan-bahan Narkoba.
- b. Mengeluarkan peraturan tidak menyalahgunakan Narkoba agar orang dapat mempunyai legalitas untuk menjual.
- c. Menjatuhkan hukum yang berat kepada aparat Negara yang melindungi pengedar dan produsen Narkoba.

---

<sup>50</sup>M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 227-228.

- d. Membuat Undang-Undang tentang Narkona terhadap penggunaan dan penyalahgunaannya.<sup>51</sup>

Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sanksi hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini seorang Hakim harus berhati-hati dalam menetapkan suatu putusan sesuai dengan ayat berikut :

...لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...

Terjemahnya :

Ia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan ia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Q.S. Al-Baqarah/2/286).<sup>52</sup>

#### 4. Dampak Narkotika Dalam Kehidupan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan semakin majunya teknologi membawa manusia kedalam dimensi baru. Pergaulan dan gaya hidup bebas membentuk suatu budaya baru terutama dikalangan generasi muda sehingga Narkotika dijadikan sebagai bahan percobaan. Narkotika memang mempunyai kegunaan tetapi mudhoratnya lebih besar di bandingkan dengan kegunaannya.

Kegunaan Narkotika dalam dunia kedokteran sangatlah bermanfaat terutama dalam dunia bedah. Tetapi dampak yang ditimbulkan akibat mengonsumsi dan menyalahgunakan Narkoba sangatlah besar seperti hilangnya kesadaran, bergembira yang berlebihan, menghilangkan rasa takut dan menjadikan seseorang percaya diri.

<sup>51</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 229.

<sup>52</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h.50.

Bukan hanya persoalan kesehatan tetapi dampak lain yang di timbulkan berupa mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Jika dilihat dari manfaat dan mudharat yang di timbulkan maka Narkoba memiliki mudharat yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya.

Selain itu disisi lain, dampak bagi kesehatan bila mengonsumsi Narkoba adalah *Paranoid* (rasa takut yang tinggi), daya tahan tubuh menurun serta yang sangat buruk yaitu terjangkit penyakit AIDS. Setiap orang harus tetap waspada dalam menjaga kesehatan agar tubuh tetap memiliki imun yang kuat serta menjauhi dan tidak menyalahgunakan Narkoba.

Disisi lain, dalam mengonsumsi Narkoba tubuh akan melemah dan kemungkinan besar akan berakibat fatal seperti kecelakaan, abnormal bahkan berujung pada kematian. Jika mengonsumsi zat atau benda ini maka akan berpengaruh pada kinerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup>Hamzah Hasan, "Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan", *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, vol.1 no. 1 (13 Juni 2012).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif atau metode (*field receacrh*) yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara kualitatif atau secara kompleks yang berkaitan dengan Militer, Narkoba, dan tindak pidana Narkotika yang dimana memfokuskan pada metode penelitian lapangan serta menghubungkannya dengan hukum Islam kontemporer.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam hal ini merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti dapat meneliti objek yang akan dikaji sehingga mendapatkan data yang relevan dan akurat. Tempat atau lokasi penelitian berada pada Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan alasan tempat tersebut merupakan sumber informasi data yang akurat tentang Anggota Militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode yang digunakan dalam membahas objek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

###### **a. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis adalah pengaruh antara perubahan hukum dalam masyarakat, memahami masalah secara mendalam dengan melihat hubungan timbal balik antara masalah dengan masalah yang lain. Terjadinya perubahan

hukum disebabkan oleh masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Hal ini bertujuan memberikan gambaran tentang objek permasalahan yang akan dikaji.

b. Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang di gunakan oleh peneliti dalam mengetahui aturan-aturan yang berlaku.

**C. Sumber Data**

**1. Data Primer**

Data primer merupakan pengumpulan sumber data dalam memperoleh informasi secara langsung dari responden wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti membutuhkan data yang akurat dan sah sehingga peneliti dapat menjawab memberikan kunci mengenai apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana tentara Nasional Indonesia memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil data primer itu sendiri. Data ini dapat diperoleh dari beberapa sumber yang berkaitan dengan Narkotika, dalam pengumpulan data peneliti juga menggunakan cara langsung yaitu berkunjung ke pihak Militer, pusat arsip, perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini merupakan langkah yang sangat efisien

dan strategis dalam mendapatkan data yang real dan memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik :

1. Observasi

Observasi ialah suatu metode yang digunakan terhadap suatu objek yang dilakukan secara turun langsung kelapangan demi mendapatkan data yang jelas. Tujuan observasi adalah untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang akurat terhadap objek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Metode ini merupakan metode yang dilakukan secara langsung dengan melalui proses tanya jawab dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung yaitu memanfaatkan media sosial yang ada dan memberikan media daftar pertanyaan yang dapat dijawab pada lain waktu.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode akhir yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan bukti dan keterangan, dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait yang berada pada lokasi penelitian. Dalam metode ini peneliti akan mengetahui jumlah data tertulis dilapangan sehingga relevan dengan pembahasan yang akan diteliti.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrument penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam pengumpulan data dikarenakan harus merujuk kepada metodologi dan sesuai dengan jenis penelitian. Instrumern yang digunakan untuk penelitian lapangan *field research* meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **1. Teknik Pengolahan data**

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam menjelaskan dan mengartikan data yang di peroleh dari lapangan untuk menarik kesimpulan maka digunakan metode *coding data*, editing data dan identifikasi data.

- a. *Coding* data merupakan mengelompokkan jawaban atau kriteria dalam contoh yang di tetapkan.
- b. Editing data ialah hasil pemeriksaan untuk mengetahui keabsahan dan menemukan jawaban pokok permasalahan terhadap kajian yang akan diteliti dengan tujuan agar mendapatkan data yang akurat dan berkualitas serta faktual terhadap sumber bacaan yang didapatkan.
- c. Identifikasi data merupakan memilah dan memisahkan data yang akan dibahas dengan mengumpulkan beberapa literatur.

### **2. Analisis data**

Analisis data merupakan suatu pola atau kategori dasar dengan tujuan mempermudah data agar bentuk bacaan lebih mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode survei dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti penjelasan terhadap berbagai macam persepsi terhadap data yang terhimpun agar tidak terjadi proses menyimpang. Sedangkan tehnik pendekatan deskripsi kualitatif ialah gambaran keadaan sejauh apa yang telah ditemukan oleh peneliti dan benar apa adanya.



## BAB IV

### **Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Hukum Islam Kontemporer**

#### ***A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika***

Jika dilihat dari sudut pandang Justisiabel maka hukum pidana Militer merupakan bagian dari hukum positif, dikarenakan Justisiabel pada peradilan Militer menentukan dasar serta peraturan mengenai tindakan yang menjadi larangan dan keharusan terhadap si pelanggar dengan ancaman pidana, serta menentukan dalam hal apa serta bagaimana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, menentukan cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Penting diketahui bahwa pengertian diatas adalah pengertian yang didasarkan kepada terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku, bukan mendasari hukum pidana apa saja yang berlaku bagi Justisiabel tersebut. Dengan kata lain apabila ditinjau dari Justisiabel (dalam hal ini Militer), maka hukum pidana Militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi Militer.

Dari uraian tersebut dapat di pahami, bahwa yang berlaku bagi seseorang Militer (atau justisiabel peradilan Militer) bukan hanya hukum pidana Militer, melainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh hukum pidana Militer dengan beberapa pengecualian), sehingga para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam

badan-badan peradilan Militer diwajibkan menguasai baik ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer.

Mengenai prosedur dalam penyelesaian perkara Militer sendiri memiliki tahapan yang sama dengan perkara umum yaitu, tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, dan yang terakhir adalah tahap eksekusi. Tetapi pada lingkup peradilan Militer, setiap tahapan tersebut memiliki ciri khas yang menandakan kekhasan dari peradilan Militer itu sendiri. Misalnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh Polisi Militer akan tetapi penyidikan dapat juga dilakukan oleh Oditur, Anjum (atasan yang berhak menghukum). Dan dapat pula dilakukan oleh Kepolisian atau Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.

Mayor CHK Djunaidi Iskandar, S.H. selaku Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar mengungkapkan mengenai keadaan penegak hukum dalam lingkup Militer saat ini : “Penegakan hukum saat ini sudah mengikuti perkembangan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain itu di lain hal disebabkan karena peradilan Militer berada dibawah naungan Mahkamah Agung serta adanya dukungan penuh mengenai penegakan hukum pada lingkup Militer termasuk diantaranya penegakan hukum bagi anggota yang melakukan tindak pidana Narkotika”. Akan tetapi dalam kenyataannya masih belum efektif dan terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum pidana Militer tersebut.

Dalam tahapan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika terdapat ketentuan yang harus diperhatikan, karena di dalam peradilan militer berlaku beberapa jenis peradilan yang telah ditentukan perannya masing-masing. Kepala

Pengadilan Militer sebagai penentu dalam pemeriksaan, apakah ini termasuk wewenang Pengadilan Militer ataukah Pengadilan Tinggi Militer. Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili ada pada anggota Militer yang berpangkat Kapten kebawah, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi mengadili tingkat pertama terdakwa yang berpangkat Mayor keatas dan mengadili tingkat kedua perkara Banding dari Pengadilan Militer. Pada tahapan pemeriksaan persidangan, Mayor CHK Djunaidi Iskandar, S.H. selaku Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar mengungkapkan bahwa : “Pada tahapan pemeriksaan didepan pengadilan dengan perkara Narkotika memakai acara pemeriksaan biasa namun dilaksanakan secara cepat dan secara keseluruhan hampir sama dengan proses-proses pemeriksaan yang lain dalam Pengadilan Militer. Selain dari pada itu terhadap pemeriksaan dilakukan suatu penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan”.

Keterlibatan upaya memfasilitasi peredaran Narkotika sebagaimana terungkap dalam kasus No. 064-K/PM.II-09/AU/III/2017 pada Peradilan Militer Bandung, dilakukan oleh oknum TNI yang memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh JTJ sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia berpangkat SERMA. Tututan Oditur Militer kepada JTJ terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1. Bahwa JTJ menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999, pada awalnya JTJ selaku terdakwa dalam kasus ini mendapatkan Narkotika jenis golongan 1 tersebut dari temannya yang berinisial AB yang pada awalnya AB hanya memberi secara cuma-cuma kepada JTJ untuk menghisap atau menggunakan Narkotika jenis golongan 1 tersebut, bahwa pada

tanggal 30 November tahun 2016 sekira pukul 22.00 WIB JTJ menelpon temannya (pemakai) dengan tujuan untuk menawarkan sabu-sabu (Narkotika jenis golongan 1) dengan harga Rp.450.000,-dengan jumlah sabu + 1/4 gr.

Dari putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 064-K/PM.II-09/AU/III/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Juni Tri Janto SERMA NRP 525214 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelanyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan secara bersama-sama”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Perkara tersebut diatas telah memenuhi unsur Pasal 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, bahwa : “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Adapun proses peradilan bagi anggota Militer yang melakukan tindak pidana tidak murni dilaksanakan pada peradilan Militer sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memperkuat keberadaan Peradilan Militer sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan : “(1) Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. (2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi”.

Dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Penyidik adalah :

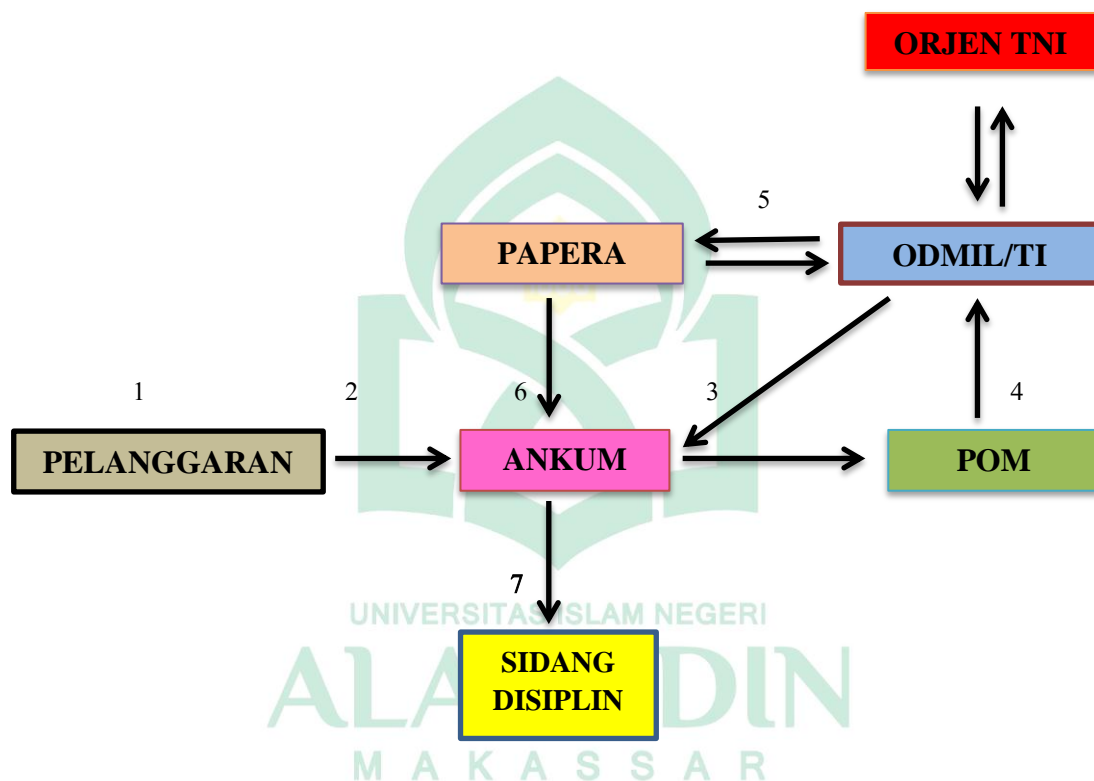
1. Para Ankuum Terhadap anak buahnya (Ankuum).
2. Polisi Militer (POM).
3. Jaksa- Jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu *upholder of Law* didalam lingkungan Militer. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi *Hankam*. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam

kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan pengawasan secara ketat dan berlanjut.<sup>54</sup>

**Tabel I. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni**

## BAGAN PENYELESAIAN PELANGGAR HUKUM DISIPLIN TIDAK MURNI



**B. Faktor Yang Menyebabkan Anggota Militer Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Fakta bahwa kasus Narkotika pada zaman yang sekarang ini bukan hanya masyarakat umum yang terlibat tetapi kepada anggota Militer juga pernah terlibat

<sup>54</sup>Riky Pribadi dan Danny Rahadian Sumpono, “Presumption Of Law”, *Implementasi Pengakuan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, Vol. 3 no.1 April 2021, h.45.

dalam kasus yang seperti ini. Tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya bahkan sampai kepada anggota Militer.

Faktor yang menjadi sebab oknum TNI memfasilitasi peredaran Narkotika adalah sebagai berikut :

#### 1. Faktor Keluarga

Kurangnya keharmonisan dalam keluarga, menjadi suatu konflik dalam suatu keluarga dimana masalah tersebut sangat sulit untuk di selesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini yang dapat memicu seseorang untuk seseorang menggunakan Narkotika agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.

#### 2. Faktor Pribadi

Goyahnya pendirian disebabkan karena mental yang lemah sehingga mudah terpengaruh kepada ajakan keburukan. Mental yang seperti ini selalu merasa sendiri dan tersingkirkan, tidak memiliki tanggungjawab, serta kurang mampu bergaul dengan baik.

Mayor Chk Djunaidi Iskandar S.H. mengatakan “pada faktor ekonomi jarang ditemukan kasus yang seperti ini dikarenakan kebanyakan sebagai penyalahguna saja”. Seseorang akan mudah terpengaruh kepada hal-hal negatif khususnya

penyalahgunaan Narkotika karena tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam kepribadiannya.

Pribadi yang seperti ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif dikarenakan krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting. Hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan dan senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang luang dengan kegiatan positif.

Disisi lain banyak faktor yang menjadi sebab seseorang menyalahgunakan Narkotika sehingga dapat menyebabkan ketergantungan. Seperti halnya seorang aparat TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang tidak melakukan tugasnya dengan baik yaitu melaukan *backing* (bantuan/sogokan). Nah ini merupakan termasuk kedalam memfasilitasi pelaku tindak pidana.<sup>55</sup> Secara keseluruhan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor internal.

#### a. Faktor Internal

##### 1. Faktor Usia

Kebanyakan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab masa remaja yang sedang mengalami perubahan *biologik*, *psikologik* maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan Narkotika maupun Psikotropika tersebut.

---

<sup>55</sup>Rahman Syamsuddin, "Jurisprudence", *Sanksi Pidana Terhadap Peminum Dan Pedagang Minuman Beralkohol*, Vol.1 no. 1 (Juli 2014), hlm.90.



## 2. Faktor Psikologis

Faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika, secara individu alasan ini merupakan alasan dari diri sendiri atau pemakai Narkotika yakni sebagai berikut.

### a. Rasa frustrasi, kecewa dan kesal

Perasaan kesal, kecewa, atau frustrasi biasanya terjadi karena kegagalan pada generasi muda, eksekutif muda, suami atau istri. Penggunaan Narkotika dan Psikotropika pada kelompok ini bertujuan untuk sesaat melupakan kekecewaan, kekesalan dan frustrasi. Kondisi masyarakat yang carut marut telah banyak melahirkan kekecewaan, kekesalan, bahkan frustrasi. Narkotika dan Psikotropika dapat melupakannya sesaat, tetapi tidak untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya.

### b. Ingin bebas dari rasa sakit dan pusing

Penderita penyakit berat yang kronis dan tidak kunjung sembuh, misalnya kanker hati, luka bakar, luka tusuk, wasir, kanker paru-paru, migren, encok, pengapuran, dan lain-lain, selalu merasakan sakit yang luar biasa karena penyakitnya. Rasa sakit tersebut sering kali tidak dapat dihilangkan dengan obat penghilang rasa sakit biasa (*analgetik*) sehingga penderitanya mencoba Narkotika atau Psikotropika. Narkotika maupun Psikotropika dapat menghilangkan rasa sakit tersebut, tetapi tidak menyembuhkan penyakitnya. Celaknya, pemakai yang bersangkutan malah mendapat masalah baru yaitu ketergantungan dengan segala komplikasinya yang justru menjadi lebih berbahaya.

### c. Faktor Pendidikan

Dalam kasus Narkotika oknum TNI yang sering terlibat dalam kasus Narkotika hanya lulusan SMA sederajat. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya Narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya Narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya pelaku memiliki pengetahuan yang terbatas pula.

#### b. Faktor Eksternal

Pada faktor eksternal terdapat pada keluarga, keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan Narkoba. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan Narkoba agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.<sup>56</sup>

### C. Penegakan Hukum Menurut Imam Mazhab Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Narkoba merupakan istilah dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya, dalam bahasa Arab Narkotika yaitu *al-Mukhaddirat* (المخدرات), *al-Aqaqir* (العقاقير), *Hasyisy* (حشيشي) yang berarti terselubung dalam kegelapan atau kelemahan.<sup>57</sup> Pada zaman Rasulullah belum di kenal istilah Narkoba tetapi hanya dikenal istilah *khamar*. *Khamar* itu sendiri menurut bahasa adalah minuman yang

<sup>56</sup>Riky Pribadi dan Danny Rahadian Sumpono, "Presumption Of Law", *Implementasi Pengakuan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, Vol. 3 no.1 April 2021, h.49.

<sup>57</sup>Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Studi Perbandingan (Bogor: Universitas Ibnu Khaldun), h. 48.

memabukkan dan sifatnya haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi yaitu :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

Artinya :

“ telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdillah, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata: telah menceritakan kepada kami zuhri, dari Abu Salamah, Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah saw. bersabda: Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram”.<sup>58</sup>

Secara khusus melalui dalil tafsili Narkoba tidak di sebut dalam al-Quran dan Hadis. Dikarenakan zat Narkoba menurut kaidah *Istishab* adalah sesuatu yang suci dan boleh digunakan. Ini sesuai dengan kaidah fiqh , *al-Aslu fi al-‘Asya’ al-Ibahah* yaitu hukum asal bagi setiap perkara adalah mubah melainkan ada sandaran yang mengharamkannya

Dalam sejarah fiqh Islami, tidak terdapat dalil tafsili berkaitan pengharaman Narkoba dalam al-Quran dan Sunnah. Para keempat Imam Mazhab yaitu Hanafiah, Maliki, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal juga tidak memberikan pendapat khusus tentang menurut hukum syariat karena Narkoba pada masa itu masih belum ada dan belum dikenal sama sekali. Pembahasan mengenai hukum penggunaan Narkoba bermula pada akhir abad keenam hijriah dan pada sejak itu para ahli fiqh telah berijtihad untuk mengeluarkan hukum syariat dengan cara mengkiaskannya kepada arak atau minuman keras melalui penelitian kepada dalil-dalil yang digunakan untuk pengharaman arak, ‘illah pengharamannya dan

<sup>58</sup>Muhammad bin Ismā‘il Abū ‘Abdillah al-Bukhārī al-Ja‘fī, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūru Rasūlullah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallama wa Sinnahu wa Ayyāmuhu*, Juz I, h. 58.

keterkaitan antara arak dan Narkoba dalam konteks pengharamannya secara alam, ternyata Narkoba mempunyai manfaat yang tersendiri kepada manusia khususnya di bidang kedokteran. Oleh karena itu, ia boleh digunakan dan dimanfaatkan. Tetapi apabila Narkoba itu disalahgunakan serta terbukti memberi dampak-dampak yang negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, hukum Narkoba itu segera berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas hukum berdasarkan logikanya (*'illah*).<sup>59</sup>

Hukum Narkoba berdasarkan ilmu usul fiqih disebut sebagai *al-hurmah li ghairih* yang pada umumnya bukan karena zatnya sebagaimana *khinzir* (babi), tetapi merujuk kepada penyalahgunaannya. Secara bahasa jika dikaitkan melalui Qias kepada pengharaman arak atau minuman keras berdasarkan persamaan keadaan *'illah* memabukkan (*al-iskar*) yang nyata merenggut fungsi akal yaitu satu dari teras *al-Kulliyat al-Khamsah*.

Seiring berjalannya waktu, penyalahgunaan Narkoba terbukti semata-mata tidak hanya merusak fungsi akal bahkan berpotensi merusak akal fikiran, fisik, agama, nyawa, keturunan dan harta. Ini dikarenakan penggunaan Narkoba pada kadar melebihi dosis yang ditetapkan dan berlaku tanpa resep Dokter, Narkoba bukan saja memabukkan tetapi juga dapat mengakibatkan ketagihan dan mengundang kemudharatan dari berbagai segi.

Pada tahap ini, pengharaman dan penyalahgunaan Narkoba dapat dikaitkan melalui logika memudaratkan, sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi *al-dhraru yuzal* yaitu kemudharatkan mesti dihapuskan, ternyata membataskan keharusan

---

<sup>59</sup>Prof.Dr. KH Achmad Satori Ismail, REPUBLIKA.co.id, *Imam Malik dan Narkoba* <https://acch.tribunnews.com/2015/08/28/menyikapi-darurat-narkoba-ala-rasulullah>.

asalnya. Lebih parahnya lagi, penyalahgunaan dan ketagihan Narkoba kini tidak sekadar memudaratkan individu bahkan turut mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat serta negara pada peringkat antarabangsa. Ini dikarenakan melibatkan kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian, pelacuran, dan penyeludupan senjata.

Hukum Islam Kontemporer mengkaji lebih dalam dan membuka ruang tentang penentuan dalil yang lebih kuat. Pengharaman dan penyalahgunaan Narkoba bukan saja boleh dilakukan melalui kias kepada arak, bahkan ia turut boleh dikaitkan melalui elemen kerusakannya. Karenanya, walaupun ada kesepakatan tentang pengharaman penyalahgunaan Narkoba tetapi dari aspek penentuan dalilnya bisa dilihat dari dua aspek, yaitu: memabukkan dan memudaratkan.

#### a. Memabukkan

Pengharaman Narkoba berdasarkan kias kepada arak karena persamaan sifat yang ada pada arak dan Narkoba yaitu memabukkan (*al-Iskar*) dan menghilangkan akal fikiran. Minuman keras (*khamar*) adalah suatu minuman yang membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih serta sangat membahayakan. Minuman keras juga dapat mengakibatkan ketergantungan dan ketagihan. Selain itu pengaruh yang di timbulkan sangat besar seperti tindak pidana kekerasan, penganiyaan dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

Dampak yang di timbulkan Narkoba tentu sangatlah banyak seperti mengakibatkan ketagihan, ketergantungan yang serius, perubahan tingkah laku, emosi, mengigau, dan juga pemikiran yang negatif. Pengharaman arak berdasarkan

---

<sup>60</sup>Hj. Rahmatiah, "Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan", *Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar*, Vol. 5 no. (2 Desember 2016), hlm. 399.

perkataan *khamar*, adalah perkara yang memabukkan dan menghilangkan akal fikiran sehingga mengakibatkan akal manusia tidak dapat berfungsi dengan baik.

Dampak negatif Narkoba telah banyak dikupas dan dijelaskan oleh beberapa ulama seperti Dr.Yusuf al-Qaradhwai, al-Hafiz al-Zahabi, al-Hafiz al-Makki, Ibnu Taimiah, dan Ibnu Baitar dalam kitabnya *al-Jamik Liqawi al-Adawiyyah wa al-Aghziyyah*. Dalam al-Quran dan Hadis Nabi saw tidak ada yang menyebutkan secara khusus tentang Narkoba.

Para ulama juga tidak menyebut perkataan ini, karena perkara ini merupakan perkara yang baru timbul serta tidak ada pada zaman Nabi saw atau para sahabat. Yang ada dalam kitab para ulama' hanya adalah perkataan *al-afyun* (opium) dan *al-Hashish*. Mereka menggunakan dalil umumnya nas hadis Nabi s.a.w atau secara kias terhadap arak karena kedua-duanya mempunyai 'illah (sebab) yang sama yaitu *al-iskar* (memabukkan). Narkoba yang termasuk perkara baru termasuk perkara lainnya tetap memiliki hukum. Imam al-Qurtubi (671H) menyatakan:

*Jika kita mewajibkan agar tidak menghukum sesuatu sehinggalah kita jumpa dalilnya (secara khusus), niscaya akan rusaklah syariat, karena nas-nas (dalil) itu sedikit. Maka sesungguhnya ia termasuk dari perkara-perkara dzohir dan umum serta boleh dikiaskan. (al-Qurtubi, Jami' li Ahkam al-Qur'an)*

Al-Zahabi berkata :

*Tidak dibolehkan mengambil Narkoba yang boleh memabukkan. (al-Bahuti, Kashaf al-Qina' an Matni al-Iqna')*

Ibn al-Qaiyim menegaskan bahwa:

*Termasuk dari arak itu semua perkara yang memabukkan sama ada cecair atau pepejal, perahan atau yang dimasak. Ia juga merangkumi suapan kefasikan dan maksiat (maksudnya Narkoba), karena semuanya adalah arak dengan nas hadis Nabi saw yang jelas dan sahih. (Ibn al-Qaiyim, Zaad al-Ma'aad.*

Dari beberapa pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa tidak ada dalil yang mengaharamkan Narkoba. Melainkan para ulama hanya mengkategorikannya

sebagai dosa besar yang menyebabkannya mendapat hukuman di dunia dan akhirat. Baginda Rasulullah saw telah memberi panduan yang lengkap dan terperinci tentang penggunaan obat-obatan serta segala bentuk kedokteran baik secara makan, minum, suntik, hirup dan sebagainya jika ia memberi pengaruh kepada akal dan memabukan maka ia seperti *khamar* baik bahayanya.

Kitab *al-Mukhaddirat Waba'a al-Syu'uub wa Saratan al-'Ukul* karangan dari Dr. Fu'aad Ali Mukhaimar beliau menjelaskan tentang pendirian as-Sunnah dalam mengharamkan perkara yang memabukkan yaitu berdasarkan pengharaman arak secara *qat'ie* dalam al-Quran. Seperti bahaya meminum arak maupun lebih bahaya darinya, maka pengharamannya adalah sama setiap keadaan.<sup>61</sup>

Imam Abu Habifah berpendapat bahwa minum arak adalah haram baik dari mana datangnya arak tersebut. Sedangkan dari penyalahgunaan Narkoba dikatakan haram apabila ia memabukkan dan memberi *'iqab* keatasnya. Imam Malik berpendapat pengharaman arak dalam Islam ialah pengharaman Narkoba secara *itlaq* baik ia dinamakan arak atau bukan arak, apabila ia memabukkan maka hukumnya adalah haram. Pendapat ini adalah sama juga dengan dua imam lagi yaitu dari mazhab Syafi'e dan Ahmad.

Di antara pendapat Imam Malik dalam hal miras adalah : Pertama, semua yang memabukkan tidak boleh dikonsumsi walaupun dalam kondisi darurat. Kedua, dalam kitab Mudawwanah juz X hlm 365, Imam Malik mengatakan, seorang Nasrani

---

<sup>61</sup>Hamzah Hasan, "Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan", *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, vol.1 no. 1 (13 Juni 2012).



harus dicambuk kalau menjual *khamar* kepada Muslim jika tahu pembelinya adalah Muslim.

Pandangan yang sama yaitu dari Dr. Ahmad Fathie Bahnasie yang mengemukakan bahwa dalam menentukan suatu hukum Narkoba serta perkara yang memabukkan itu merupakan haram berdasarkan nas al-Quran dan Hadis Rasulullah. Hukuman terhadap penyalahguna Narkoba kiranya di kenakan hukum *ta'zir* karena Narkoba merupakan jalan menuju kemungkaran dan kemusnahan.

Dibawah ini merupakan beberapa nas dan hadis yang membicarakan secara khusus tentang arak dan perkara yang memabukan.

1. Allah berfirman

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ ...

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk. (Q.S. an-Nisa/4/43)

2. Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَرُ حَسْبُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْ تَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Maidah/5/90)<sup>62</sup>

<sup>62</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h.50.



3. Hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam Musnadnya dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sanadnya dengan sanad yang sahih dari pada Ummu Salamah

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Ibn Numair dia berkata; telah mengabarkan kepada kami al-Hasan bin Amru dari al-Ahkam dari Syahr bin Hausyab dia berkata; saya telah mendengar Ummu Salamah berkata, “Rasulullah Telah melarang segala perkara yang memabukkan dan melemahkan. (HR. Bukhari)<sup>63</sup>

4. Hadis dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Aburrobi'i al-Atakiyyu, dan Abu Kamil, berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram dan sesiapa yang meminumnya di dunia dia adalah pengguna arak dan dia tidak akan meminumnya di akhirat nanti”. (H.R. muslim)<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Abū ‘Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥambal bin Hilāl bin Asd al-Syaibāni, *Musnad al-Imām bin Ḥambal*, Juz 44 (Cet. I; Tuki: Ma’susata al-Risālah, 2001), h. 246.

<sup>64</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Kusyarīyu, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adl ‘An al-‘Adli ila Raṣulullāh Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam*, Juz III (Bairūt: Dār Iḥyāu al-Tarōsi al-Arobīu, t.th.), h. 1587.

## 5. Satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

Artinya :

“ telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdillah, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan, dia berkata: telah menceritakan kepada kami zuhri, dari Abu Salamah, Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah saw. bersabda: Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram”.<sup>65</sup>

## 6. Aisyah r.a. telah berkata, Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مَهْدِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجَمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُونٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، مَا أَسْكِرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْهُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ»: قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ: «الْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ»

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la dari Hisyam bin Hassan dari Mahdi bin Maimun -dalam riwayat lain- Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mu'awiyah Al Jumahi, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun maknanya satu, dari Abu Utsman Al Anshari dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram, jika satu Faraq (tiga sha' atau enam belas liter) darinya memabukkan, maka sepenuh telapak tangannya juga haram." (HR. Tirmizi)<sup>66</sup>

<sup>65</sup>Muhammad bin Isma'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallama wa Sinnahu wa Ayyāmuhu*, Juz I, h. 58.

<sup>66</sup>Muhammad bin 'Isa bin Sawrota bin Mūsa bin al-Dīhāka, al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz IV (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabatu wa Maṭba'ati muṣṭafa al-Bābi al-Halābī, 1975 ),h. 293.

b. Memudaratkan

Secara bahasa kemudharatan adalah sebagai perihai atau keadaan mudarat dan kerugian. Sedangkan mudarat adalah sesuatu yang merugikan dan membahayakan. Menurut Ibrahim Ahmad Syalabie dalam kitab *Al-iman wa Al-Idman* berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba yaitu haram berdasarkan kepada nas al-Quran dan Hadis.

Selanjutnya beliau berpendapat bahwa mereka yang menghalalkan penyalahgunaan Narkoba adalah satu kepalsuan dan penipuan yang amat sangat besar. Jika dilihat dari segi kemudharatan maka Narkoba lebih parah dari minuman keras. Di lihat dari dampak yang akan di timbulkan terhadap kesehatan tubuh.

Dalam kitab fatwa ulama "*Fi al-Tadkhin Wa al-Mukhaddirat*" oleh Solahuddin Mahmud al-Saed telah menguraikan beberapa fatwa yang berkaitan dengan hukum penyalahgunaan Narkoba serta alasan penentuan dalilnya. Ulama yang menggunakan alasan pengharaman penyalahgunaan Narkoba berdasarkan kemudharatan di antaranya adalah Syekh Khalid bin Ahmab bin Abdullah al- Maliki al-Jakfari, Syekh Umar bin Ahmad al-Masri al-Hanafi, Syekh Muhammad Hayat al-Madani, Abdullah Ibnu Abdurrahman Abu Battin, Muhammad Ibnu Salim al-Baijani, Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir al-Sakdi.

Kemudharatan Narkoba yang terdapat dalam karya-karya kontemporer

- a. Kemudharatan Narkoba dari segi fisik, mental dan emosi
- b. Penyalahgunaan Narkoba akan menyebabkan beberapa pengaruh kepada pengguna.

Pengguna Narkoba akan mengalami pengaruh *euforia* serta mengalami halusinasi (rasa khayal), dari segi fisiologi pengguna akan mengalami peningkatan

sel darah putih dan jumlah gula dalam darah, kerusakan otot-otot dan peningkatan suhu badan. Selain itu, sistem saraf pusat (saraf dan saraf tunjung) juga akan mengalami kerusakan. Lama-kelamaan, kadar penafasan pengguna Narkoba akan menjadi lebih pendek dan perlahan. Tubuh pengguna juga akan mengigil akibat penurunan kadar metabolisme.

Disamping itu, mata pengguna juga akan menjadi kemerah-merahan serta sayu dan berat badan pengguna Narkoba turut akan mengalami penurunan secara mendadak. Sedangkan pengaruh atau ancaman terhadap salah satu objektif syariat yang lima yaitu pengaruh pada menjaga nyawa dan akal.

#### c. Dampak Narkoba Pada Bidang Sosial

Ketagihan Narkoba akan membawa mengakibatkan risiko dijangkiti HIV/AIDS, Hepatitis dan Sawan. Hal ini dikarenakan, mereka menggunakan alat suntikan yang dibagi dengan pengguna lain. Bagi ibu yang mengandung akan membawa risiko seperti keguguran, kandungan yang tidak stabil, cacat atau mati. Ia juga boleh dikatakan telah mengancam salah satu dari tujuan syariat yaitu menjaga nyawa dan keturunan.

Selain itu, pengguna Narkoba kebanyakan dikaitkan dengan penyakit Psikosis (tidak siuman), kerusakan otak dan ketidakstabilan emosi. Oleh Karena itu, mereka akan terdorong untuk melakukan perkara di luar kendali seperti merampok, mencopet memperkosa, dan membunuh serta meningkatkan jumlah terjadinya masalah sosial. Penyakit sosial ini akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya.

#### d. Dampak Narkoba Kepada Keluarga

Ketagihan Narkoba telah memberi pengaruh yang serius kepada kehidupan kekeluargaan antaranya menjadi beban ekonomi rumah tangga karena kepala keluarga akan membelanjakan sebagian besar hartanya untuk mendapatkan modal dan keperluannya untuk membeli Narkoba. Pengguna juga akan mengabaikan anggota keluarga dan keperluan-keperluan dasar anggota keluarga, tidak menghormati antara satu sama lain, menipu dan tidak beramanah terutama dengan diri sendiri.

Pengaruh penyalahgunaan Narkoba terhadap ibu mengandung ialah memberi pengaruh kepada janin dalam kandungan, mencemar oksigen yang akan digunakan untuk pernafasan ibu serta pengaliran darah dalam badan ibu. Maka dapat dikatakan ia telah mengancam objektif syariat yaitu menjaga keturunan.

#### e. Dampak Narkoba Pada Bidang Ekonomi

Jumlah harta yang dihabiskan untuk Narkoba kebiasaannya adalah terlalu banyak. Jika Narkoba ditanam dalam satu kelompok masyarakat yang juga menggunakannya maka hilangnya sebagian dari kekayaan negara disebabkan oleh penyalahgunaan tanah ladang yang sepatutnya digunakan untuk tanaman yang memberi faedah dan tenaga manusia yang mengusahakan tanah ladang itu sendiri.

Tambahan pula, jumlah uang yang digunakan untuk tujuan mengimport peralatan, pengeluaran perjalanan dan kesehatan sudah tentu akan dihabiskan bukan pada tempatnya. Maka dari itu ia telah mengancam penjagaan harta yang merupakan salah satu dari objektif.

Ringkasnya, berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan Hadis, baik dari konteks memabukkan maupun memudaratkan, penyalahgunaan Narkoba jelas haram

hukumnya. Pengharaman ini meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengannya seperti yang diriwayatkan oleh Termizi dan Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW pernah melaknat tentang *khamar* yang bermaksud:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَيْبِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمَشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمَشْتَرَاةَ لَهُ" [ص: 582] هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir ia berkata; Aku mendengar Abu 'Ashim dari Syabib bin Bisyr dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamr; Orang yang memeras, yang meminta diperaskan, peminum, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, yang memakan hasilnya, pembelinya dan yang minta dibelikan. Abu Isa; Hadits ini gharib dari hadits Anas. Dan telah diriwayatkan hadits seperti ini dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. Tirmidzi)<sup>67</sup>

Bedanya apabila ia dilihat dari segi memabukkan, kemudaratannya penyalahgunaan Narkoba hanya fokus kepada aspek menghilangkan fungsi akal saja dan hanya dalam konteks individu. Manakala jika penentuan dalilnya dirujuk kepada sifat memudaratkan, maka ia menghilangkan kelima-lima perkara yang disebut sebagai *al-Kulliyat al-Khamsah* yaitu agama, nyawa, harta, akal, keturunan. Hal ini juga turut melibatkan individu, masyarakat dan Negara.<sup>68</sup>

Jika dilihat dari manfaat dan dampak yang di timbulkan dari Narkoba maka dari sisi dampaknya sangatlah merugikan, oleh karena itu hukum Islam memberikan hukuman yang secara tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dengan berbagai jenis Narkoba, nama serta bentuknya telah diidentifikasi pengaruhnya

<sup>67</sup>Muhammad bin 'Isa bin Sawroh bin Mūsa bin al-Daḥāk, al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz V, (Mesir: Syurkatu Maktubatu wa Matba'atu Muṣṭafaal-Bābi al-Ḥalbī, 1395 H/1975 M), h. 581.

<sup>68</sup>Heri Ruslan, *Imam Malik dan Narkoba*, Khazanah, Rabu 13 Juni 2012.

sangatlah berbahaya terhadap akal dan fisik. Maka sanksi hukuman yang di berikan dikategorikan sebagai *khamar* dan secara tegas sangatlah di benci oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan berat dan ringannya hukuman yang akan diberikan, al-Quran tidak menyebutkannya tetapi hanya disebutkan dalam al-Sunnah Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ» ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا غُنْفَةً

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Syababah dari Ibnu Abu Dzi'b dari Al Harits dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seseorang mabuk, maka kalian harus menghukumnya dengan hukuman dera, Apabila ia mengulanginya, maka kalian harus menghukum dera kembali. Dan apabila mengulangi lagi, maka kalian harus menghukumnya dengan hukuman dera kembali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada yang ke empat kalinya: 'Apabila ia mengulanginya lagi, tebaslah lehernya.' (HR. Ibnu Majah)<sup>69</sup>

Umar bin Khattab meminta pendapat tentang *khamar* Ali bin Abi Thalib berkata :

“Hendaknya engkau mencambuknya sebanyak 80 kali, karena ia meminum yang memabukan. Jika ia telah mabuk, maka ia bicara tidak karuan dan sudah bicara tidak karuan maka ia berbohong”.

Setelah mendengar perkataan itu maka Umar bin Khattab menentukan hukuman bagi peminum *khamar* adalah dicambuk 80 kali. Hadis dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw bersabda :

<sup>69</sup>Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh muḥammad bin Yazīd al-Qazuwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, (t.t.: Dār Ihyāu al-Kitāb al-‘Arobiyyah, t.th.), h. 859.



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ شَيْبِ بْنِ يَشْرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمِشْتَرِيَ لَهَا، وَالْمِشْتَرَاةَ لَهُ " : [ص:582] هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُثْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir ia berkata; Aku mendengar Abu 'Ashim dari Syabib bin Bisyr dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamr; Orang yang memeras, yang meminta diperaskan, peminum, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, yang memakan hasilnya, pembelinya dan yang minta dibelikan. Abu Isa; Hadits ini gharib dari hadits Anas. Dan telah diriwayatkan hadits seperti ini dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. Tirmidzi)<sup>70</sup>

Dari hadist diatas maka para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap peminum *khamar* adalah dikenakan *had* yang berupa hukuman cambuk atau dera baik sedikit maupun banyaknya. Tetapi menurut para ulama dalam hal berat dan ringannya sanksi hukum mereka berbeda pendapat.

Menurut mazhab Maliki dan Hanafi hukuman bagi peminum *khamar* dicambuk 80 kali. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hanya diberikan hukuman 40 kali cambuk, hal ini didasarkan pada tindakan Ali bin Abi Thalib yang pada waktu itu mencambuk Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambuk. dan menurut mazhab Hanbali dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ada yang mengatakan 80 kali ada juga yang mengatakan 40 kali.

Pendapat Abu Hanifah, Malik dan Hanbali yang mengatakan 80 kali dicambuk didasarkan pada tindakan Umar bin Khattab, dimana sanksi ini telah menjadi *ijma'* yang telah berlaku dimana khalifah Umar bin Khattab. Dari segi *atsar*,

<sup>70</sup>Muhammad bin 'Isa bin Sawroh bin Mūsa bin al-Daḥāk, al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz V, (Mesir: Syurkatu Maktubatu wa Matba'atu Muṣṭafaal-Bābi al-Ḥalbī, 1395 H/1975 M), h. 581.



Umar menetapkan 80 kali cambuk sebagai sanksi *had*, bagi peminum *khamar*. Imam Syafi'I menanggapi sanksi dengan dicambuk 80 kali merupakan *had*, menurut imam Syafi'I sanksi dengan dicambuk 80 kali hanya sebagai *ta'zir* dikarenakan hukuman *had* bagi peminum *khamar* dicambuk sebanyak 40 kali seperti hal nya dipraktekkan oleh Rasulullah.

Menurut Imam al-Mardawi perbedaan antara hukuman *ta'zir* dengan hukuman *had* adalah untuk sanksi *ta'zir* diberikan kepada seseorang yang sering melakukan kejahatan sedangkan sanksi atau hukuman *had* tidak pemberian maaf, dalam hukum *ta'zir* ada kemungkinan pemberian maaf. Dalam sanksi atau hukum *had* kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan terhadap tubuh sedangkan *ta'zir* tidak sampai mengalami kerusakan seperti itu.

Dari penjelasan di atas jika di dikaitkan dengan Narkotika seperti yang telah diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan sangatlah besar melebihi *khamar*. Selain dapat mengakibatkan over dosis juga dapat mengakibatkan kematian, selain dari itu juga dapat menimbulkan tindakan kekerasan seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

Dari ketentuan hukum baik *had* maupun *ta'zir*, dan dari segala pertimbangan yang cukup kompleks maka penulis menarik kesimpulan melalui analisa dari metode qiyas dengan *khamar*, hukuman atau sanksi dari penyalahgunaan Narkoba dikenakan sanksi gabungan atau *had* dan *ta'zir* sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan selama itu memungkinkan.

---

<sup>71</sup> Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Sebuah Studi Perbandingan*, vol.XI. no.1 Januari 2013.

## BAB V

### PENUTUP

#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana, penegakan hukum terhadap anggota Militer yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika dalam hal ini pada kasus No. 064-K/PM.II-09/AU/III/2017 Terdakwa dipidana dengan Pidana Pokok berupa Penjara 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.
2. Faktor yang menjadi penyebab anggota Militer memfasilitasi pelaku tidak pidana Narkotika yaitu faktor Internal dan faktor Eksternal seperti faktor keluarga, pribadi, psikoogi, usia dan pendidikan.
3. Menurut Imam Mazhab penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu berbeda-beda menurut Abu Hanifah, Malik dan Hanbali dicambuk 80 kali didasarkan pada tindakan Umar bin Khattab sebagai sanksi *had*. Menurut Imam Syafi'i sanksi dengan dicambuk 80 kali hanya sebagai *ta'zir* sedangkan bagi peminur *khamar* dikenakan sanksi *had* berupa dicambuk sebanyak 40 kali.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan beberapa implikasi yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya dilakukan pengkajian terhadap Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam persoalan hukuman atau sanksi diberikan hendaknya lebih dipertegas lagi agar kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Bukan hanya efek jera tetapi juga dapat memberikan rasa takut dan menjadi pelajaran untuk yang lainnya, hal ini dikarenakan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara nomor 064-K/PM.II-09/AU/III/2017 hanya memberikan pidana pokok berupa satu tahun penjara.
2. Dalam dunia Militer hendaknya lebih dilakukan pemahaman terhadap dampak yang ditimbulkan jika mengkonsumsi Narkoba dan lebih memperhatikan setiap prajurit agar tidak terlalu tertekan sehingga menimbulkan stress terutama kepada Tentara Remaja yang masih labil ingin mencoba hal baru.
3. Peneliti berharap dalam penelitian agar kiranya memberikan pemahaman dan kemudahan dalam mengetahui tentang Narkotika, Hukum Pidana, dan Pidana Militer. Serta peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang berkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Prof. H. Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- al-Ja'fi, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī. *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūru Rasūlullāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallama wa Sinnahu wa Ayyāmuhu*. Juz I Cet. I; Dār Ṭūki Najātī, 1422.
- al-Kusyarīyū, Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan. *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-'Adl 'An al-'Adli ila Raṣūlullāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*. Juz III Bairūt: Dār Ihyāu al-Tarōṣi al-Arobīu, t.th.
- al-Syaibāni, Abū 'Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥambal bin Hilāl bin Asd. *Musnad al-Imām bin Ḥambal*, Juz 44 Cet. I; Tuki: Ma'susata al-Risālah, 2001.
- Antara News, "Seorang Oknum TNI Jadi Bandar Narkoba Ditangkap Polisi di Bali", *m.antaranews.com*, 17 juli 2020. [https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s \(21 Januari 2021\).](https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s (21 Januari 2021).)
- Al-Tirmidzi. Jāmi' al-Shahīh, III, (Bayrut: Dār al-Fikr, t.t.).
- Darwis, Ahmad. Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya*, (Medan : UMN Al Washliyah Fak Ekonomi, 2017), vol. 1, h. 38.
- Detik News, "TNI juga Bisa Diadili di Peradilan Umum", *new.detik.com*, 31 Mei 2012. [http://newsdetik.com/berita/d-1929102/tni-juga-bisa-diadili-di-peradilan-umum \(21 Januari 2021\).](http://newsdetik.com/berita/d-1929102/tni-juga-bisa-diadili-di-peradilan-umum (21 Januari 2021).)

- Dirjosisworo, Dr. Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987.
- Dirdjosisworo, Dr. Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Dydo, Todiruan. *Pergolakan Politik Tentara Sebeleum dan Sesudah G 30 S/PKI*. Jakarta: Golden Terayon Press, 1989.
- Gunadi, Kombes. Pol. Dr. Ismu dan Dr. Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hasan, Hamzah. “Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan”, *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, vol.1 no. 1 (13 Juni 2012).
- Hermawan, Nandang. “Kode Etik-TNI Angkatan Darat”, *Situs Resmi tniad.mil.id*. <http://tni.ad.mil.id/kode-etik/> (19 Juli 2012 ).
- Hungtington, Samuel P dan Burhan Magenda. *Militer dan Politik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ibnu Mājah Abū ‘Abdillāh muḥammad bin Yazīd al-Qazuwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, t.t.: Dār Ihyāu al-Kitāb al-‘Arobiyyah, t.th.,
- Ihyak , “Relevansi Konsep Hakim Perempuan dalam Peradilan Agama Indonesia” *Studi Komparatif Ibn Habib Al-Mawardi dengan Ibn Mas’ud Al-kasani*, vol. 1 (Ejournal Inklusif, 2016).
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Ismail, KH Achmad Satori Ismail. REPUBLIKA.co.id, *Imam Malik dan Narkoba*  
<https://aceh.tribunnews.com/2015/08/28/menyikapi-darurat-narkoba-alarasulullah>.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Makara, Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia, 2005.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Bayrut : Dar al-Fikr 145 H/1995 M.

Muhammad bin 'Isa bin Sawroh bin Mūsa bin al-Dāḥāk, al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz V, Mesir : Syurkatu Maktubatu wa Matba'atu Muṣṭafaal-Bābi al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.

Muhammad bin 'Isa bin Sawrota bin Mūsa bin al-Dihāka, al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz IV, Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabatu wa Maṭba'ati muṣṭafa al-Bābi al-Halābī, 1975.

Pabbu, A. & Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2014.

Partodiharjo, dr. Subagyo. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Pribadi, Riky. dan Danny Rahadian Sumpono, "Presumption Of Law", *Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*, vol. 3 no.1 April 2021.

Pusat Penerangan TNI, tni.mil.id

Ra'Uf., Hm. *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*. Jakarta: Dharma Bhakti, 2002.

Rahmatiah, Hj. “Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan”, *Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar*, vol. 5 no. 2 Desember 2016.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1974 tentang Peradilan Militer”.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Ruslan, Heri Ruslan. *Imam Malik dan Narkoba*, Khazanah, Rabu 13 Juni 2012.

Salam, Moh Faisal. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

Saifullah, Acep. *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Studi Perbandingan, Bogor: Universitas Ibnu Khaldun.

SerambiNews.com, *Menyikapi Darurat Narkoba Ala Rasulullah*, <https://aceh.tribunnews.com/2015/08/28/menyikapi-darurat-narkoba-ala-rasulullah>.

Suhadi. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, 1996.

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Babinkum TNI, 2012.

- Sudanto, Anton. “*Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*”, AIDIL, Jurnal Hukum Vol 7 No.1, hlm 150-154.
- Sunarso, Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Naarkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. *Langkah-Langkah Perjuangan Kita*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Syamsuddin, Rahman. “Jurisprudence”, *Sanksi Pidana Terhadap Peminum Dan Pedagang Minuman Beralkohol*, vol.1 no. 1 Juli 2014.
- Syamsuddin, R. & Fuady, M.I.N. (2020). *Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah di Kota Palopo*, Jurnal Wawasan Yuridika, 4 Januari.
- Syamsuddin, R. & Aris, I. *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, 2014.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenada Media, 2019.
- Syamsuddin, Rahman. *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, 2013.
- Syamsuddin, Rahman. Et al. “*The Effect Of The Covid-19 Pandemic On The Crime Of Theft*”, International Journal Of Criminology and Sociology 10, 2021.



# LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No.63 Telp. (0411) 864928-864930 Fax.864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa Telp. 0411-841879, Fax: 0411-82211400

Nomor : B- 1034 /SH.01/PP.00.9/02/2021

Gowa, 16 Februari 2021

Sifat : Penting

Lamp. : Proposal

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar

di

Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Putri Anisa  
Nim : 10300117036  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan/prodi : PMH  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Perum. Batara Mawang

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, dengan judul skripsi :

***" Analisis Putusan Hakim tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Anggota Militer yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba".***

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hamzah Hasan, M.H.I  
2. Dr. Rahman Syamsuddin, S,H.M.H.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar, terhitung mulai tanggal 16 Februari 2021 s.d.16 Maret 2021

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam  
  
Dr. H. Muhammad Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.  
Nip. 19731122 200012 1 002

Tembusan:

- Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa



**PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**  
Jl. Batar Bira Km. 16 No. 5 Makassar Telp : 0411-518080 / 0411-518086  
Website : [www.dilmil-makassar.go.id](http://www.dilmil-makassar.go.id) Email : makassar@dilmil.org

Nomor : W3.Mil05/86/PB.00/III/2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Makassar, 03 Maret 2021

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Alauddin Makassar

di-

Makassar

1. Dasar :

a. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-1034/SH.01/PP.00.9/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika"

b. Pertimbangan Pimpinan dan Staf.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan Mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat Sdra di atas untuk melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar, terhitung mulai tanggal 25 Februari 2021 s.d tanggal 25 Maret 2021"

3. Demikian untuk dimaklumi.



Kepala Pengadilan Militer III-16

Adeng, S.Ag., S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Tembusan :

1. Kadilmilti III Surabaya
2. Rektor UIN Alauddin Makassar
3. Mahasiswi Putri Anisa ✓





## PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Jl. Batara Bira Km. 16 No. 5 Makassar  
Telp : 0411 - 518080 / 518085 Fax : 0411 - 518086  
Website : [www.dilmil\\_makassar.go.id](http://www.dilmil_makassar.go.id) Email : [makassar@dilmil.org](mailto:makassar@dilmil.org)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W3.Mil05/ 97 /PB.00/III/2021

Merujuk Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-1034/SH.01/PP.00.9/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul **"Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika"** dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar :

Nama : Putri Anisa  
NIM : 10300117036  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan/Program : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar, Jl. Batara Bira, No. 5 KM. 16 Baddoka, Biringkanaya, Makassar, mulai dari tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 8 Maret 2021  
a.n. Kepala Pengadilan Militer III-16  
Sekretaris



Andi Dala Uleng, S.H.  
Kapten Sus NRP 535949









## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Putri Anisa, lahir di Basokeng, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2000 dari pasangan suami istri yang bernama Muh. Yusuf dan Nurlina. Anak kedua dari 2 bersaudara ini pertama kali melangkahkan kaki ke dunia pendidikan pada tahun 2004 di TK Raodha Erekeke, dan melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2005 di SDN 260 Erekeke, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Dusia 11 tahun telah menyelesaikan studi pertama. Kemudian pada tahun 2011-2014 melanjutkan ke tingkat pendidikan pertama pada Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 3 Bulukumba, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Dalam pendidikan pertama ini penulis aktif dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pramuka dan Ekstra Kurikuler cabang olahraga Volly. Kemudian pada tahun 2014-2017 melanjutkan ke tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Bulukumba, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Dalam melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis aktif pada bidang OSIS, Pramuka dan Komunitas Bimbingan Belajar Kimia. Setelah menyelesaikan studi, penulis memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu dan melanjutkan studi serta memilih jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum sebagai tempat atau wadah untuk berproses. Selain itu penulis juga aktif dalam Unit Keorganisasian Mahasiswa (UKM) Taekwondo. Penulis menekuni bidang seni bela diri untuk mengembangkan bakat dan kemampuan, serta menyandang gelat Atlet Fighter Wanita Under 49-53. Penulis juga aktif dalam organisasi Himpunan

Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Mazhab dan Hukum periode 2018, selain itu juga aktif dalam organisasi *Independent Law Student* (ILS), ILS merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang hukum dan hanya merekrut mahasiswa Hukum. Selanjutnya penulis juga aktif pada Komunitas Guru Untuk Bangsa yang dimana komunitas ini bergerak ke pelosok-pelosok untuk mengabdikan secara ikhlas.

